

**PENGARUH ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH: STUDI KASUS BAITUL MAL
ACEH**



Diajukan oleh :
Eko Gondo Saputro
18918004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PENGARUH ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH: STUDI KASUS BAITUL MAL ACEH**

Tesis S-2

Program Magister Ekonomi Keuangan



Diajukan oleh :

Eko Gondo Saputro

18918004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan berlaku”.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Yang Menyatakan



Eko Gondo Saputro



SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 205/Ka.Div/10/Div.PP/V/2020

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Eko Gondo Saputro**
Nomor Mahasiswa : **18918004**
Dosen Pembimbing : **Sahabudin Sidiq, Dr., MA.**
Prodi : **Magister Ekonomi Dan Keuangan**
Judul Karya Ilmiah : **Peran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dalam Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh: Studi Kasus Baitul Mal Aceh**
Nomor Hp : **087843323408**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **15% (lima belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan


Bambang Hermawan, S.Si Chh

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 10 Juli 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sidiq', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

EKO GONDO SAPUTRO

No. Mhs. : 18918004

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**PENGARUH ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
ACEH: STUDI KASUS BAITUL MAL ACEH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I

Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.

Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,



Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Sholawat dan Salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggan bagi keluargaku tercinta. **Tesis ini kupersembahkan untuk:**

1. Mamaku tersayang Dra. Nokilah, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta dukunganmu.
2. (Alm) Papa dan Neneku tercinta, terima kasih selalu senantiasa menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Adikku Arya Adi Permana tersayang, terima kasih selalu senantiasa menjadi dorongan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Untuk sahabatku Nurkhaerat Sidang, Hening Pratika Nila Hapsari, dan Cahyasani Kamella Dewi, Mira Misisaifi, Lutfi Bangun Lestari, yang selalu bersama dari awal semester hingga akhir. Terima kasih sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini,

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh: Studi Kasus Baitul Mal Aceh*. Tugas akhir atau tesis ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 2 (S2) dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik berupa waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan.

6. Seluruh Staf Program Studi Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu mahasiswa, terkhusus penulis dalam menjalankan proses studi.
7. Baitul Mal Provinsi Aceh yang telah membantu dalam kelancaran proses penulisan karya tulis ini.
8. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
9. Terima kasih kepada bias-bias penulis yang selalu memberikan hiburan dan semangat dalam menjalani proses penyelesaian studi ini.
10. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah atas kebaikan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Eko Gondo Saputro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT KETERANGAN HASIL KEMIRIPAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BERITA ACARA TESIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRACT.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	14

BAB II : KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Kemiskinan.....	16
2.1.2 Ukuran Kemiskinan.....	18
2.1.3 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan.....	21
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25
2.1.5 Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.1.6 Pengertian Zakat.....	29
2.1.7 Dasar Hukum.....	31
2.1.8 Syarat dan Rukun Zakat	34
2.1.9 Objek Zakat	36
2.1.10 Pihak yang berhak menerima zakat	38
2.1.11 Tujuan Zakat	41
2.1.12 Zakat Dalam Perspektif Makro	43
2.1.13 Pengertian Infaq	45
2.1.14 Pengertian Shadaqah	46
2.1.15 Pendidikan.....	48
2.1.16 Kesehatan	50
2.1.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	52
2.1.18 Zakat dan Indeks Pembangunan Manusia.....	56
2.2 Penelitian Terdahulu.....	58
2.3 Kerangka Pemikiran	64

2.4 Perumusan Hipotesis	65
BAB III : METODE PENELITIAN	67
3.1 Jenis Penelitian	67
3.2 Obyek Penelitian	67
3.3 Jenis dan Sumber Data	67
3.4 Metode Pengumpulan Data	70
3.5 Definisi Operasional Data	71
3.6 Metode Analisis Data	74
3.7 Tahapan Analisis Data.....	79
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
4.1 Profil Baitul Mal Aceh	81
4.1.1 Latar Belakang	81
4.1.2 Visi dan Misi	82
4.1.3 Legal Formal	82
4.1.4 Struktur Organisasi.....	83
4.1.5 Program-Program Baitul Mal Aceh.....	85
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	91
4.3 Analisis Data Kuantitatif.....	95
4.3.1 Menilai <i>Outer Model</i>	95
4.3.2 Menilai Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	101
4.4 Analisis Interpretasi Hasil	111
4.4.1 Pengaruh ZIS terhadap Pendidikan	111

4.4.2 Pengaruh ZIS terhadap Kesehatan.....	115
4.4.3 Pengaruh ZIS terhadap IPM	116
4.4.4 Pengaruh ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi	118
4.4.5 Pengaruh ZIS terhadap Kemiskinan.....	121
BAB V : PENUTUP.....	128
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN	137



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Barang, Nisab, dan Zakatnya.....	37
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data	68
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	91
Tabel 4.2 Outer loading	96
Tabel 4.3 Nilai <i>Cross loading</i>	97
Tabel 4.4 Nilai Reliabilitas Konstruk Eksogen terhadap Konstruk Endogen	99
Tabel 4.5 Signifikansi <i>Outer Model</i>	100
Tabel 4.6 Nilai R^2 Variabel Laten Endogen	102
Tabel 4.7 <i>Goodness of Fit (GOF)</i>	105
Tabel 4.8 <i>Path Coefficient</i>	106
Tabel 4.9 Pengaruh Tidak Langsung.....	108
Tabel 4.10 Pengaruh Spesifik Tidak Langsung.....	109
Tabel 4.11 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2014-2018	122
Tabel 4.12 Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Aceh.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi per Maret 2019	3
Gambar 1.2 Persentase Penduduk miskin Kab/Kota Aceh Tahun 2016-2018....	4
Gambar 1.3 PDRB Atas Harga Konstan Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2018...	5
Gambar 1.4 IPM Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2018	6
Gambar 1.5 Total Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Kab/Kota Provinsi Aceh	9
Gambar 2.1 Penanggulangan Kemiskinan Menurut Islam.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	64
Gambar 3.1 Diagram Path.....	76
Gambar 4.1 Diagram Path pada Model Penelitian.....	100
Gambar 4.2 Uji Kompetensi Guru Tahun 2015	112
Gambar 4.3 Angka Partisipasi Kasar Kab/Kota Aceh (2016-2018).....	113
Gambar 4.4 Anggaran Pendidikan melalui ZIS dan Pemerintah Provinsi Aceh (2015- 2018).....	114
Gambar 4.5 Realisasi Penyaluran ZIS sesuai Asnaf (2015-2017).....	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, ZIS, dan Pendidikan	137
Lampiran 2 Data Kesehatan dan IPM.....	145



ABSTRAK

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menjadi pembuka jalan bagi perkembangan Islam di Indonesia, oleh karena itu Aceh memiliki keislaman yang kental dan menjadi kiblat bagi ilmu pengetahuan. Inovasi yang dilakukan dalam pengetahuan Islam dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola dana zakat yang terhimpun dari masyarakat, menjadikan Provinsi Aceh melalui BAZNAS Provinsi yaitu Baitul Mal Aceh menjadi salah satu BAZNAS dengan tingkat Allocation to Collection Ratio (ACR) yang highly effective. Baitul Mal Aceh memiliki program unggulan yang memiliki tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki yang terdiri dari program bantuan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Namun Provinsi Aceh salah satu Provinsi dengan presentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square Modeling (PLS-SEM). Hasil menunjukkan adanya pengaruh langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan IPM, serta adanya pengaruh total tidak langsung ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan adanya pengaruh ZIS melalui IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Keywords: *ZIS, Kemiskinan, Partial Least Square (PLS)*

ABSTRACT

Aceh Province is one of the provinces which paved the way for the Islamic development in Indonesia. Therefore, Aceh has a strong Islam and is the center of science. Innovations made in Islamic knowledge with government policies in managing zakat funds collected from the community-made Aceh Province through the Provincial BAZNAS namely Baitul Mal Aceh one of the BAZNAS with highly effective Allocation to Collection Ratio (ACR) levels. Baitul Mal Aceh has a superior program that has the aim of making Mustahik into a muzzaki consisting of education, health assistance, and economic empowerment programs. However, Aceh Province is one of the provinces with the highest percentage of poverty in Indonesia. This research was conducted to see the effect of Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) through Economic Growth, Education, Health, and HDI on Poverty in Aceh Province. The method used in this research is Partial Least Square Modeling (PLS-SEM). The results show the direct influence of ZIS on Economic Growth, Health, and HDI, as well as the total indirect effect of ZIS on Economic Growth and Poverty in Aceh Province. The results also showed that the influence of ZIS through Health and HDI on Economic Growth and the influence of ZIS through HDI on Poverty in Aceh Province

Keywords: ZIS, Poverty, Partial Least Square (PLS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-harinya selalu diiringi dengan nilai-nilai keislaman. Kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari konsumsi masyarakat, Indonesia perlu memastikan halal atau tidaknya suatu produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga kegiatan yang berhubungan dengan sistem keuangan yaitu salah satunya adalah kehadiran sistem *dual banking* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang diperuntukan untuk umat muslim pada khususnya dalam memilih peranti keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

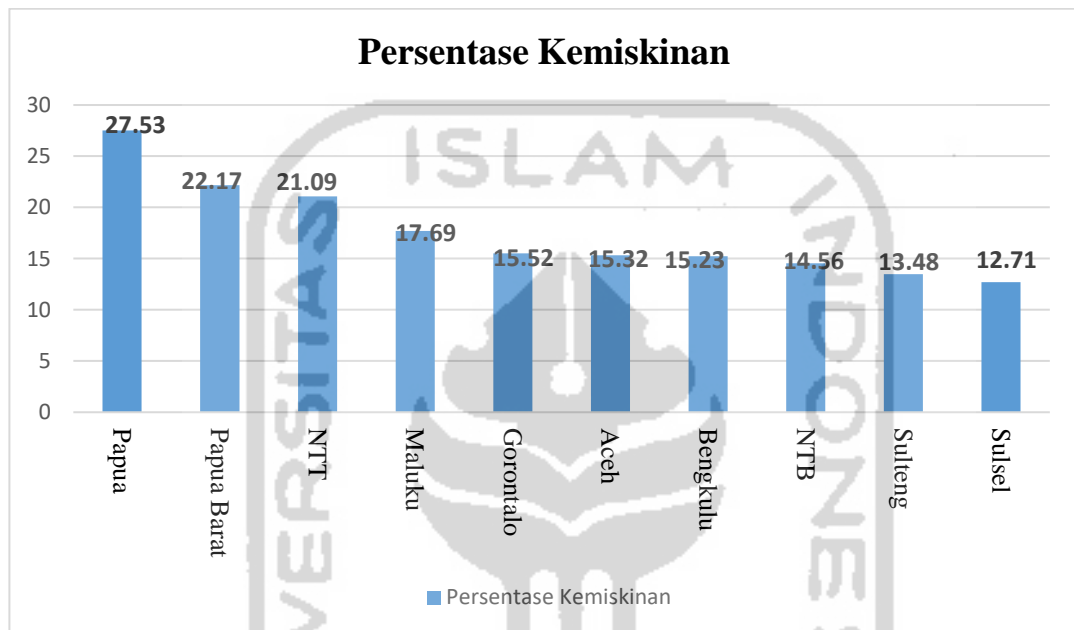
Terlepas dari ciri khas “Keislaman” yang dimiliki negara Indonesia, terdapat salah satu provinsi yang juga dikenal memiliki ciri khas keislamannya yang sangat kental yaitu Provinsi Aceh. Provinsi ini terletak di daerah paling barat Indonesia tepatnya di hujung utara pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh. Menurut Muhammad (2004), para sejarawan memperkirakan Islam memasuki Aceh melalui Perlak atau Samudera Pasai antara abad ke-7 atau ke-9 M dan langsung datang dari Makkah ke Aceh, sehingga Provinsi Aceh digelar sebagai kota “Serambi Makkah”. Perkembangan ajaran Islam yang pesat menjadikan Provinsi Aceh menjadi kiblat bagi ilmu pengetahuan Islam sampai saat ini. Oleh sebab itu Provinsi Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih menetapkan hukum syariat Islam baik itu dalam pemerintahan maupun kegiatan masyarakat sehari-hari.

Nilai-nilai keislaman ini tidak hanya berhenti pada ilmu pengetahuan saja, akan tetapi dimodifikasi dengan program-program pemerintah provinsi Aceh yang memiliki dampak kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di antara program tersebut adalah pemerintah Aceh melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Aceh memanfaatkan dana zakat yang dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada bidang-bidang yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dalam penyaluran dananya dilakukan kepada ketiga bidang tersebut tidak hanya meliputi “dana” yang langsung diterima oleh masyarakat, tetapi penyediaan fasilitas dan pengembangan diri bagi masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memiliki dampak jangka panjang yang baik bagi perekonomian Provinsi Aceh itu sendiri.

Di luar dari alasan sebuah kewajiban setiap umat muslim, masyarakat Provinsi Aceh mendukung penuh terhadap penghimpunan dana zakat ini. Berdasarkan Laporan Outlook Zakat Indonesia 2018, dijelaskan bahwa Provinsi Aceh melalui BAZNAS Provinsi Aceh (Baitul Maal Aceh) dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan persentase ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang *highly effective* (sangat efektif), bahkan di tahun 2018 melebihi angka 100%. Ini membuktikan bahwa penerapan hukum syariat Islam pada masyarakat Aceh yang sangat teguh dan dukungan masyarakat terhadap badan zakat dalam menghimpun dana zakat.

Dalam pelaksanaan program penyaluran zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh ini seringkali dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang umumnya menimpa di daerah-daerah lainnya, yaitu kemiskinan. Permasalahan besarnya

angka kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan pokok dalam perekonomian Indonesia. Presentase kemiskinan Provinsi Aceh yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia menjadi permasalahan yang besar bagi provinsi Aceh.

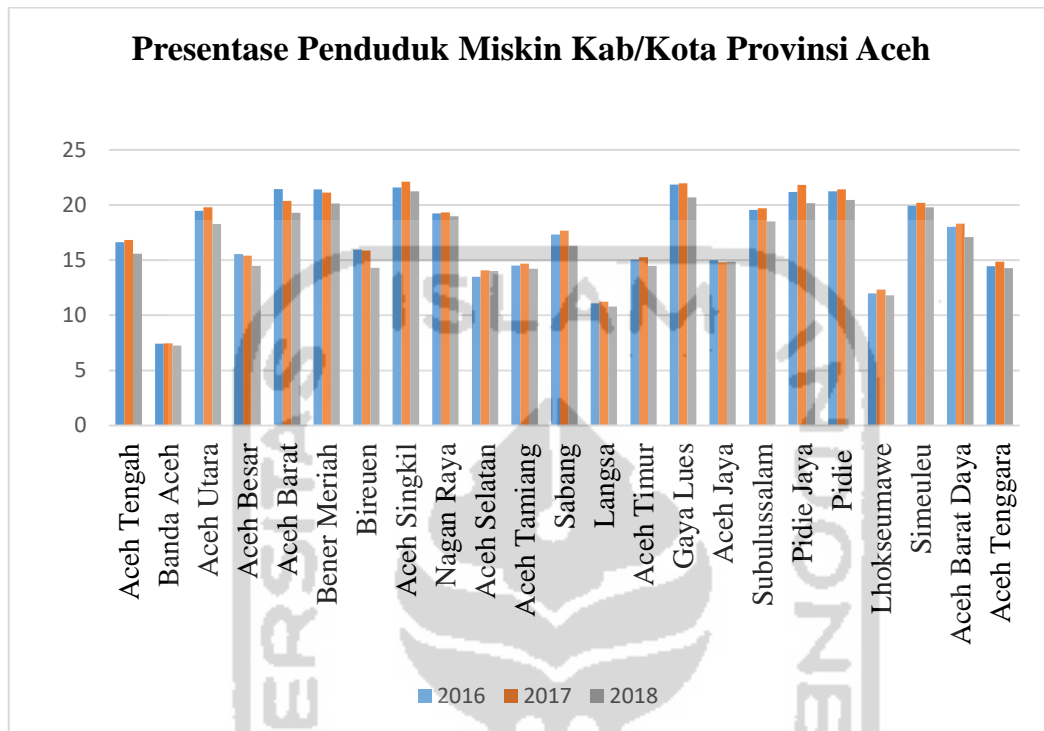


Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi per Maret 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data di atas menunjukkan 10 Provinsi di Indonesia dengan persentase kemiskinan terbesar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-6 dengan persentase kemiskinan tertinggi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan persentase kemiskinan sebesar 15.32%. Data ini menunjukkan bahwa salah satu wilayah yang menyumbang persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi pemerintah

Provinsi Aceh dalam mencapai tujuan akhir dari penyaluran dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan.

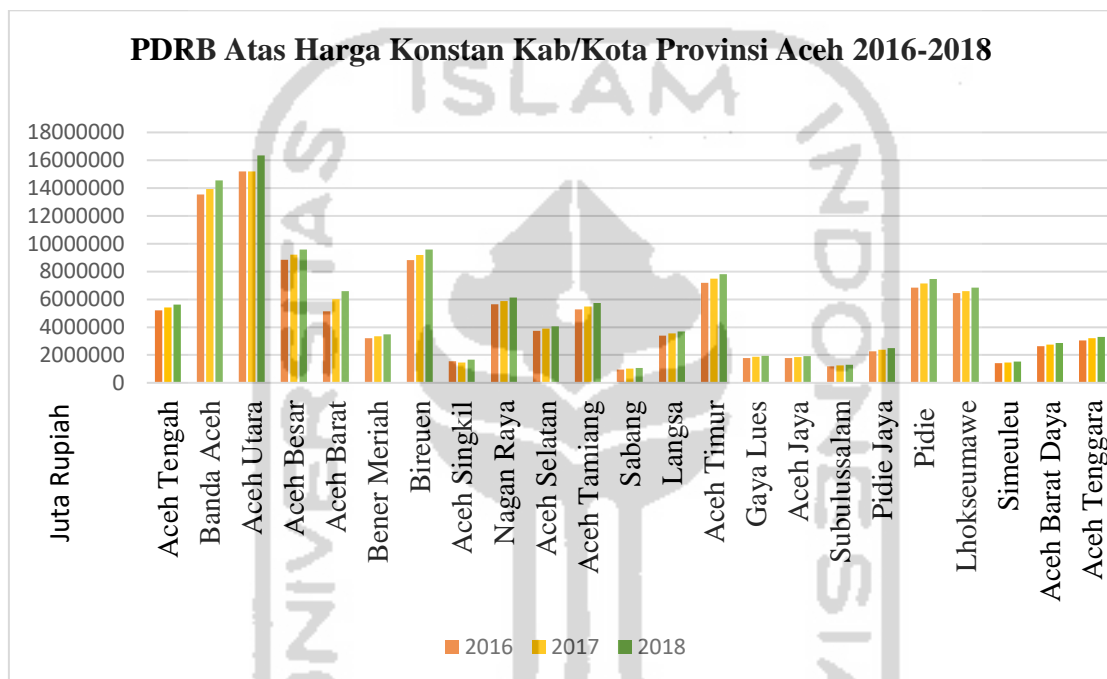


Gambar 1.2 Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota Aceh Tahun 2016-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Gambar 1.2 menunjukkan presentase penduduk miskin di kab/kota Provinsi Aceh selama periode 2016-2018. Kabupaten dengan presentase penduduk miskin tertinggi adalah kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Pidie, dengan angka presentase penduduk miskin menunjukkan rata-rata pada angka 20%. Kabupaten dengan presentase penduduk miskin terkecil adalah Banda Aceh, itu karena wilayah Banda Aceh merupakan sentral perekonomian dari provinsi Aceh. Namun, apabila dilihat dari segi fluktuasi yang terjadi dari 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh, seluruh kabupaten/kota seluruhnya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.

Akan tetapi angka presentase kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota masih terbilang tinggi karena berkisar di angka 11% hingga 20%. Sehingga meskipun presentase penduduk miskin kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan selama periode 2016 hingga 2018 namun sebagian besar kab/kota di Provinsi Aceh memiliki nilai presentase penduduk miskin yang tinggi.

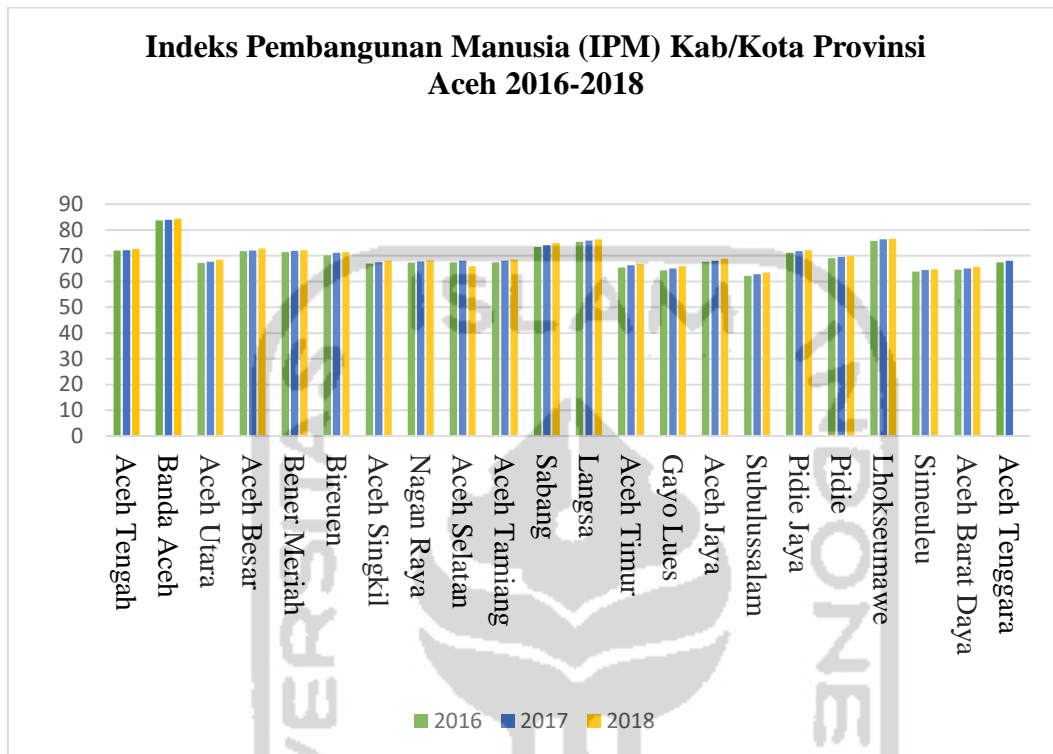


Gambar 1.3 PDRB Atas Harga Konstan Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cerminan perekonomian Provinsi Aceh, dalam data di atas menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilihat dari PDRB selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2018). Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah kabupaten Aceh Utara dan terendah adalah kabupaten Sabang. Meskipun kabupaten Aceh Utara memiliki PDRB tertinggi bahkan lebih besar dibandingkan dengan sentral ekonomi Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh,

namun kabupaten Aceh Utara memiliki tingkat presentase kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Banda Aceh.



Gambar 1.4 IPM Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota Provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Indeks ini juga menunjukkan bahwa kualitas dari masyarakat selalu meningkat, sehingga apabila dibandingkan dengan peningkatan PDRB Provinsi Aceh merupakan suatu hal yang wajar. Karena semakin kualitas masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat lebih produktif untuk dapat menciptakan sesuatu hal yang bernilai. Keadaan inilah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Aceh.

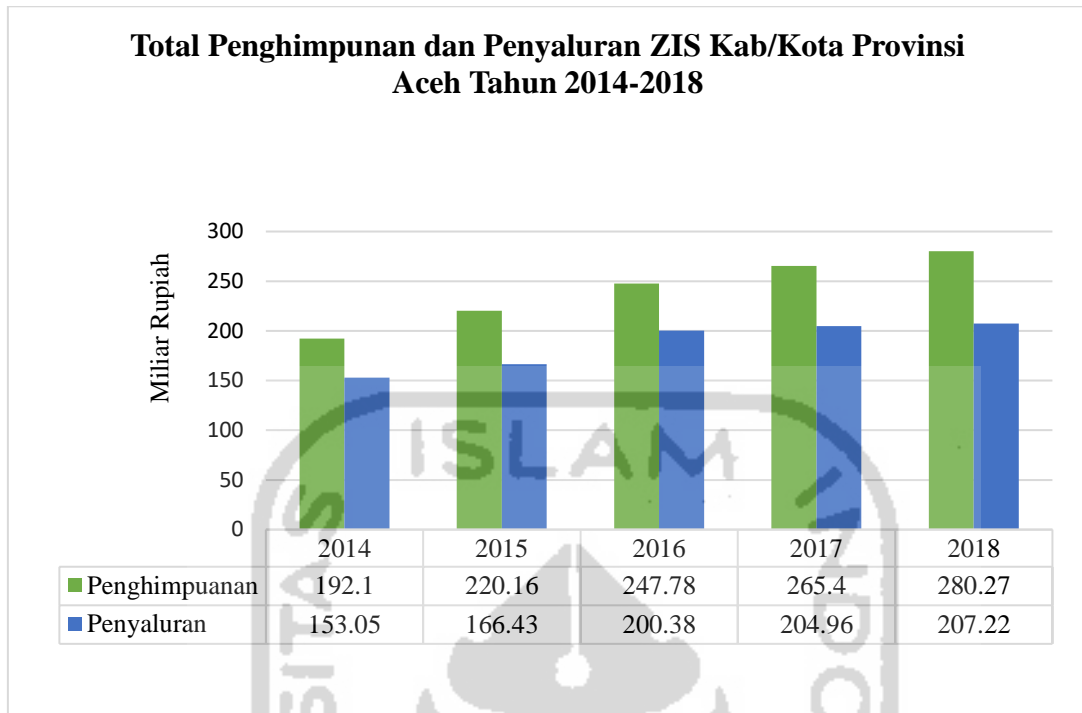
Islam memiliki perhatian yang cukup serius dalam mengentaskan kemiskinan. Islam memerintahkan umatnya untuk tidak merasa bahwa harta yang dimilikinya merupakan miliknya sepenuhnya, akan tetapi di dalam harta tersebut terdapat hak untuk orang lain. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkanlah dari hartanya yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menfakanhkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.* Dari tafsir ayat Al-Qur’an ini dapat menarik makna yang jelas bahwa Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap upayanya dalam mengentaskan kemiskinan.

Bentuk dari kewajiban dalam mengeluarkan sebagian harta bagi setiap individu muslim diinterpretasikan dalam pilar Islam yang ketiga yaitu zakat. Menurut Mulajawan, dkk (2016) zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu. Sehingga ini menjelaskan bahwa harta yang kita miliki ialah sepenuhnya bukan milik kita, tetapi di dalamnya terdapat “hak” bagi pihak tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa zakat merupakan salah satu bentuk instrumen dalam Islam yang menjadi salah satu alat dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam suatu periode tertentu.

Perhatian pemerintah Provinsi Aceh terhadap kewajiban-kewajiban masyarakatnya dalam melaksanakan perintah Allah SWT sangatlah diperhatikan, salah satunya adalah zakat. Sehingga kombinasi peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Aceh dengan hukum syariat Islam (Qanun) yang bertujuan untuk dapat memberikan

manfaat potensi ekonomi umat Islam yang mana pemerintah memberikan perhatian khususnya dalam penghimpunan, penyaluran dana zakat dari *muzzaki* sehingga dapat berjalan efektif dan dengan ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam perekonomian daerah setempat.

Peraturan tersebut diimplementasikan melalui peraturan pemerintah daerah UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 180 ayat (1) huruf d, pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) yang menerangkan bahwa zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun dan ketentuan pasal 213 ayat 94 UU no 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan, dan keperluan suci lainnya. Dan Qanun Aceh No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam.



Gambar 1.5 Total Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Kab/Kota Provisni Aceh

Sumber: Baitul Mal Aceh

Gambar 1.5 menjelaskan kegiatan pemerintah Aceh melalui badan zakat nasional (BAZNAS) Provinsi yaitu Baitul Mal Aceh dalam menghimpun serta menyalurkan zakat. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat Provinsi Aceh (Kab/kota) secara kesuluran setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang secara terus menerus yang terjadi dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat di Provinsi Aceh (Kab/Kota) menjelaskan bahwa peran pemerintah melalui baitul maal Aceh dalam menghimpun zakat dapat di katakan berhasil dan terlaksana secara efisien. Kemudian, dengan jumlah penghimpunan yang cukup besar menunjukkan bahwa masyarakat Aceh dalam hal ini dapat melaksanakan kewajiban yang menjadi perintah dalam syariat Islam dengan baik.

Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam memberikan manfaat dari penghimpunan zakat yaitu menyalurkan dana yang sudah dihimpun untuk di salurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya yang bertujuan sebagai bentuk dari pengentasan kemiskinan. Apabila dilihat dari kurun waktu 2014 hingga 2018 penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Baitul Maal Aceh dapat dikatakan hampir seluruhnya dari penerimaan zakat di salurkan dengan baik. Artinya jumlah dana zakat yang terkumpul, hampir seluruhnya di salurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam penyalurannya melalui Baitul Mal Aceh, di salurkan dalam bentuk berbagai program yang meliputi 4 sektor utama penyaluran, yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, dan Dakwah & Syiar Islam. Dari keempat program tersebut secara keseluruhan, berfokus pada bentuk upaya pengentasan kemiskinan serta program Dakwah dan Syiar Islam yang menjadi ciri keIslaman yang khas dari Provinsi Aceh.

Bentuk penyaluran yang erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Dalam hal ini bentuk penyaluran yang dilakukan adalah dalam bentuk program bantuan pendidikan berkelanjutan atau beasiswa bagi masyarakat miskin mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang program D3. Sehingga harapannya ini dapat menghapuskan angka kemiskinan di Provinsi Aceh, karena dengan masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM dan diikuti oleh produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Kemudian bentuk penyalurannya selanjutnya adalah bentuk penyaluran zakat produktif, dengan pemberian modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan

sasaran para pelaku usaha mikro. Sehingga dalam bidang pendidikan dan ekonomi ini akan berdampak pada kesejahteraan sosial dari masyarakat Provinsi Aceh, karena ketika masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan sehingga ia lebih produktif kemudian ditambah dengan adanya program zakat produktif sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat, maka ini dapat menciptakan kemandirian masyarakat dan dengan ini masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan.

Selanjutnya pada bidang kesehatan, melalui penyaluran zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh sarana dan prasarana kesehatan yang baik. Sehingga dalam hal ini erat kaitannya dengan upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan masyarakat, ketika seseorang memiliki akses kesehatan yang baik maka akan berdampak positif pada kondisi kesehatan dari masyarakat. Maka ini akan memiliki efek berganda pada kemampuan seseorang untuk menjadi lebih produktif sehingga masyarakat mampu menciptakan sesuatu yang bernilai.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Baitul Mal Aceh melakukan penghimpunan zakat serta distribusinya dengan konsep pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka dengan menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka terjatuh dalam kemiskinan. Konsep yang diterapkan ini diharapkan dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* atau dapat diartikan menjadikan mereka yang terjatuh kemiskinan menjadi mandiri dari segi ekonomi sehingga mampu untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu program-program penyalurannya di desain dalam rangka pemberdayaan zakat sehingga

potensi *mustahiq* dapat di optimalkan dari segi kapasitas dan ekonomi mereka dapat meningkat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari studi kasus penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi yaitu Baitul Maal Aceh yang dijadikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengentasan kemiskinan di Provinsi di Aceh, dan dana zakat yang di himpun setiap tahunnya dengan angka yang terbilang besar dengan bentuk program penyaluran yang menysasar pada upaya pengetasan kemiskinan, namun Provinsi Aceh masih menjadi salah satu Provinsi dengan angka kemiskinan terbesar di Indonesia. Kemudian dengan ciri khas keislaman yang berbeda dengan Provinsi lainnya, akan menjadi sebuah kajian yang menarik sehingga dapat di terapkan pada wilayah Provinsi lainnya dalam memaksimalkan penghimpunan zakat dan dengan program-program yang diharapkan dapat sama-sama mengurangi angka kemiskinan di wilayah – wilayah lainnya yang ada di Indonesia.

Sehingga dengan studi kasus Provinsi Aceh yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan kemiskinan yang tertinggi, namun penghimpunan serta penyaluran zakat yang sangat efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, maka akan lebih di perjelas dengan menghubungkan variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kaitanya mewakili kualitas serta kesejahteraan sosial masyarakat akan memperjelas permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh dari Zakat Infaq Shadaqah

(ZIS), Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah terdapat pengaruh ZIS melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
- b. Apakah terdapat pengaruh ZIS melalui Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
- c. Apakah terdapat pengaruh ZIS melalui Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
- d. Apakah terdapat pengaruh ZIS melalui IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh ZIS melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
- b. Untuk menganalisis pengaruh ZIS melalui Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
- c. Untuk menganalisis pengaruh ZIS melalui Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

- d. Untuk menganalisis pengaruh ZIS melalui IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengembangan teori-teori dalam makro Islam khususnya yang berhubungan dengan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi mengingat penelitian mengenai zakat masih belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya dalam perspektif ekonomi makro.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan khususnya yang berhubungan dengan program pengetasan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk program alternatif dalam mengentaskan kemiskinan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Susunan pada bagian ini meliputi penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan dengan tema penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

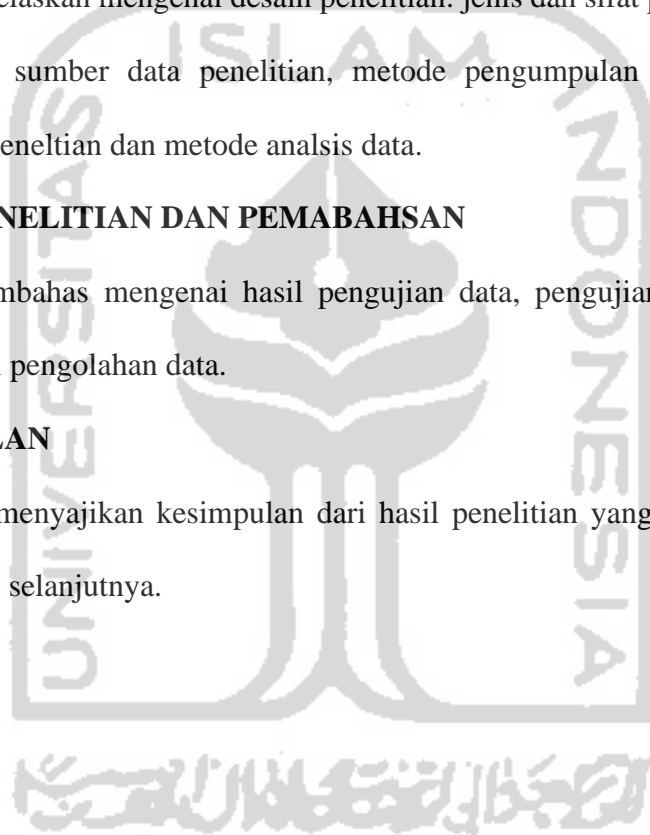
Pada bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian: jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan definisi operasional variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Menurut Arsyad (1990), di dunia ilmiah masalah kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh para ilmuan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut. Sosiolog maupun ekonom telah banyak menulis tentang kemiskinan, tetapi istilah seperti standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan lebih sering digunakan dalam ilmu ekonomi, sedangkan istilah kelas, stratifikasi dan marginalitas digunakan oleh para sosiolog (Margaret & Midgley, 1982).

Menurut Ale (1980), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan, serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Sedangkan Black dkk., (2009) dalam Oxford Dictionary of Economics mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar konsumsi yang memadai. Standar yang dimaksud adalah ketika seseorang dapat terhindar dari kelaparan atau tidak tercukupya kebutuhan konsumsi diantara Negara-negara dalam kurun waktu tertentu. Lebih jauh lagi Asian Development Bank (2006), mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan aset dan peluang yang menjadi hak setiap manusia. Setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan maupun kesehatan dasar.

Dari beberapa penjelasan mengenai kemiskinan diatas, sebagian besar berhubungan dengan kepemilikan faktor produksi, produktivitas, hingga tingkat pengembangan masyarakat itu sendiri yang kemudian berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan yang di rancang oleh pemerintah. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Kemudian pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggnakan sumber-sumber pendapatan yang sebesarnya tersedia bagi mereka (Alfian dkk, 1980).

Sebagai tambahan Suharto (2009), telah mengklasifikasikan empat penyebab dari kemiskinan. Pertama, faktor individual, yang berhubungan

dengan aspek patologi termasuk faktor fisik dan psikologis masyarakat miskin. Kedua, faktor sosial, yang berhubungan dengan bagaimana seseorang tetap terjatuh kemiskinan. Contohnya; dikucilkan dalam lingkungan sosial yang disebabkan oleh diskriminasi gender. Ketiga, faktor kultural, yang berhubungan dengan kebiasaan negatif dan mental dari masyarakat miskin. Dan yang keempat, faktor struktural, yang berhubungan dengan bagaimana ketidakadilan muncul dan sistem insentif tidak bisa diakses bagi seluruh kalangan sosial.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut Hakim (2002), Kemiskinan bisa didefinisikan menurut dua pendekatan, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standar tertentu, sementara kemiskinan relative bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok yang lain dalam masyarakat.

Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang (atau keluarga) yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan perumahan (di beberapa negara ditambah dengan kebutuhan dasar khas setempat). Karena berbagai tambahan tersebut, tingkat kemiskinan absolut di suatu Negara bisa berbeda dengan tingkat kemiskinan absolut di Negara lain, sehingga sulit untuk

membuat perbandingan antar Negara tersebut. definisi kemiskinan abolut juga bervariasi menurut standar hidup antar waktu dan antar daerah.

Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana seseorang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun di kategorikan “ miskin ” . Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditemukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absoulut. Konsep kemiskinan relative bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebetuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI)

yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Head Count Index (P_0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini, maka menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan begitu juga sebaliknya, bila angka P_0 besar maka menunjukkan semakin tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan *gap* antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka P_1 maka menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga sebaliknyaam ketika angka P_1 besar, maka semakin besar kesenjangan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indkes maka menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin yang semakin memburuk.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angla P_2 maka menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata, begitu juga sebaliknya semakin besar

angka P_2 maka menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk yang tidak merata.

2.1.3 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

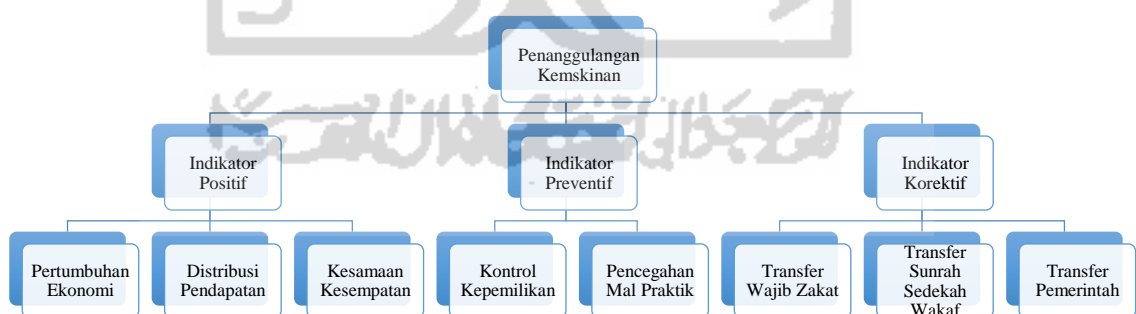
Seiring dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan kemiskinan tidak serta merta selalu dikaitkan dengan aspek pendapatan atau kekayaan semata. Kemiskinan lebih dimaknai sebagai bentuk yang multi-aspek, yaitu kekurangan atau ketidakmampuan untuk mencapai sebuah kehidupan sosial yang memenuhi standar kehidupan yang layak.

Menurut Muljawan dkk ., (2016), pemikiran tentang kemiskinan tidak terlepas dari pemikiran tentang tujuan adanya syariah atau *maqasid syariah*. Berbagai ajaran syariah yang berkaitan erat dengan urusan kemiskinan seperti zakat, sedekah, bertetangga dan sebagainya. Miskin berkaitan dengan konsep kebutuhan manusia terutama kebutuhan dasar. Kemiskinan menurut pandangan Islam, berkaitan erat dengan konsep kebutuhan manusia yang terdiri dari lima konsep kebutuhan dasar manusia (*lima maslahah*), yang meliputi: agama (*dien*), jasmani (*nafs*), akal atau pengetahuan (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kesejahteraan materi (*maal*).

Dalam pandangan Islam, pembangunan memiliki peran penting di dalam melawan kemiskinan. Menurut ekonom muslim, pembangunan menurut Islam sendiri memiliki cakupan yang lebih luas serta rentang waktu yang panjang. Setidaknya ada lima karakteristik pembangunan, yaitu;

komprehensif meliputi aspek moral, spiritual dan material bagi kehidupan manusia, pembangunan manusia, aspek fisik dan lingkungan sosial budayanya, adanya keseimbangan antara sumber daya ekonomi, adanya perubahan, kuantitas dan kualitas dengan penekanan pada aspek perubahan kualitas, dan yang terakhir adanya optimalisasi pemanfaatan dan distribusi sumber daya (Sadeq, 2006).

Sehingga sudah seharusnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab moral dan sosial. Secara fikih sudah merupakan kesepakatan bersama (*ijma*) bahwa kepedulian terhadap kaum miskin merupakan kewajiban sosial dan moral setiap orang. Yang mana secara strategis dan teknis tentang bagaimana cara menanggulangi kemiskinan merupakan wilayah perbedaan pendapat antar para sarjana muslim. Secara umum, pendekatan yang ditawarkan dalam menanggulangi kemiskinan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Penanggulangan Kemiskinan Menurut Islam

Sumber: Sadeq (2006), hal 308

Kebutuhan untuk menurunkan tingkat kemiskinan telah ditegaskan lebih lanjut dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun secara startegis dan teknis diperlukan pemikiran oleh para ekonom muslim maupun ulama. Secara umum penurunan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk menyusun serangkaian kebijakan dalam rangka menurunkan bentuk kemiskinan tertentu.
2. Untuk menyediakan jaminan kehidupan layak minium atau mengadopsi sistem distribusi pendapatan yang adil. Penjaminan terhadap tingkat kehidupan yang layak ini bukan sekedar penetapan tingkat upah minum, namun mencakup hal yang lebih komprehensif, seperti penjaminan pendapatan minimum, layanan kesehatan, akses pendidikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.
3. Untuk menyiapkan instrumen redistribusi yang sesuai prinsip syariah dan mengimplementasikannya. Setidaknya terdapat dua instrumen pengentasan kemiskinan yang disepakati oleh ahli fikih, yaitu hukum waris dan zakat.

Zakat merupakan kewajiban transfer yang proses distribusinya sangat dikaitkan guna menurunkan tingkat kemiskinan. Dari delapan golongan mustahik, seluruhnya menunjukkan kelompok yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu dibiarkan bermuamalah atau bertransaksi melalui mekanisme pasar semata. Namun demikian, proses pendistribusian zakat ini identik dengan proses transfer pendapatan sehingga bisa jadi tidak efektif. Menurut Mannan (1986), dampak pembayaran zakat ini dapat positif ataupun negative dan dapat dikategorikan

menjadi tiga, yaitu; Efek perbuatan baik (*good ect effect*), efek penumpang gelap (*free rider effect*), dan efek distribusi pendapatan.

a. Efek Perbuatan Baik (*good act effect*)

Indikator sukses atau tidaknya zakat tidak semestinya diukur dari dibayar tidaknya zakat semata, namun seberapa besar manfaat atas zakat yang dibayarkan. Efek perbuatan baik ini sering dijumpai bahwa para muzaki merasa sudah cukup puas dengan membayar zakat dengan tanpa memperdulikan sebagai manfaat dari zakat yang di bayarkan.

b. Efek Penumpang Gelap (*free rider effect*)

Efek penumpang gelap artinya adanya sekelompok yang mau menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi. Hal ini bisa terjadi jika zakat didistribusikan untuk penyediaan barang public, seperti layanan ibadah atau pendidikan, maka insentif untuk melakukan perawatan atau kontribusi sosial menjadi rendah.

c. Efek Distribusi Pendapatan

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta merta akan menjadikan pendapatan masyarakat menjadi adil dan merata. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti distribusi faktor produksi di suatu Negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima zakat, dan sebagainya.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian suatu Negara sangat berpengaruh besar pada kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di Negara tersebut. Sehingga di perlukan sebuah metode yang menjelaskan perubahan kondisi perkeekonomian. Salah satunya kita mengenalnya dengan *Gross Domestic Bruto* (GDP) atau *Produk Domestik Bruto* (PDB). *Produk Domestik Bruto* (PDB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang di produksi di suatu Negara pada periode tertentu. Sehingga kita juga dapat katakan bahwa PDB adalah suatu alat untuk mengukur perekonomian suatu Negara berjalan dengan baik atau buruk. PDB dalam hal ini menghitung seluruh pendapatan total yang diperoleh semua pihak dalam perekonomian tersebut. Dalam hal ini PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam pereknomian dan jumlah pembelajaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian.

Kemudian apabila ingin menilai apakah suatu daerah (regional) telah berhasil dalam implementasikan program-program pembangunan melalui kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut dapat diukur dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah seluruh nilai barang

dan jasa oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah (BPS, 2016). Sedangkan menurut Todaro (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Sehingga apabila dilihat dari penjelasan-penjelasan tersebut, PDB dengan PDRB pada dasarnya memiliki makna yang sama baik secara konsep, definisi metodologi, cakupan, maupun sumber data yaitu mengukur seluruh pendapatan atau kegiatan ekonomi akhir yang di hasilkan, namun yang membedakan adalah PDB mengukur kondisi perekonomian suatu Negara sedangkan PDRB mengukur kondisi perkeonomi suatu daerah (regional). Menurut Kuncoro (2004), menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap periode ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk mengetahui:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- b. PDRB atas harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peranan besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita per kepala atau satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.5 Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Metwally (1995), zakat pada harta yang produktif tetapi tidak diproduktifkan akan mendorong bagi pemiliknya untuk memproduktifkannya apabila tidak ingin hartanya habis dimakan zakat. Tingkat zakat atas aset yang tidak/kurang produktif mewakili biaya oportunitas untuk melakukan investasi. Disisi lain, zakat tersebut akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya perkeonomian, penyerapan tenaga kerja pendapatan, dan

kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong perekonomian.

Qardhawi (1998), menambahkan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, maka harta yang dikeluarkan zakatnya secara mikro ekonomi akan tumbuh dan secara makro ekonomi akan dapat menumbuhkan ekonomi. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memiliki dimensi akhirat dan dimensi dunia, tetapi dua dimensi tersebut tidak akan memiliki dampak yang berarti dalam perkeonomian apabila pelaksanaannya tidak disatukan dengan aktivitas ekonomi.

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan sejumlah indikator. Untuk mengetahui dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi, maka zakat dapat dimasukkan ke dalam indikator pengukuran. Analisis korelasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hubungan antara zakat dan pertumbuhan. Dengan demikian zakat dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan dan dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Beberapa ekonom muslim percaya bahwa zakat yang diinvestasikan sesuai dengan prioritas produksi keseluruhan akan menguntungkan orang miskin khususnya dan perekonomian secara umum, yaitu melalui efek multiplier terhadap pekerjaan dan pendapatan. Zakat secara bertahap akan menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga pada segilintir orang. Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat dalam

perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dari orang-orang, dan akhirnya akan meningkatkan volume agregat zakat yang terkumpul, yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif laju pertumbuhan ekonomi dalam hal mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tingkat inflasi.

2.1.6 Pengertian Zakat

Menurut Kahf (2002), zakat merupakan pilar ketiga dari agama Islam, dan mungkin merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi dalam Islam. Karena pilar utama tersebut, menggambarkan pentingnya peran zakat dalam menerapkan keadilan ekonomi dan untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih, dan berkembang, sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang yang dikeluarkan tersebut disebut zakat karena, yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengenai pengertian zakat menurut etimologi dan terminology, Ridwan dan Muhammad (2005) menjelaskan bahwa kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berikatan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat yang berarti zakat itu akan mencusikan seseorang yang mengeluarkan zakat dan menumbuhkan pahalanya. Oleh karena itu jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang memilikinya). Kemudian berbicara mengenai definisi zakat menurut terminology, memiliki makna yang dimaksudkan sebagai penunaian, yaitu penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta.

Sehingga dari beberapa definisi baik dari sisi bahasa (etimologi), maupun dari sisi istilah (terminologi) terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai pengertian zakat secara sederhana. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi kita umat muslim (yang memiliki sejumlah harta) untuk kemudian keluarkan atau diberikan dalam bentuk (zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Yang memiliki tujuan sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mensucikan diri maupun harta yang kita miliki.

2.1.7 Dasar Hukum

A. Al-Qur' an

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Pada dasarnya zakat merupakan material sekaligus bentuk ibadah spiritual yang mana bertujuan untuk memurnikan kekayaan dengan memberikan sejumlah uang kepada orang miskin yang membutuhkan dari pendapatan yang melebihi *nisab* setelah setahun penuh. Istilah ini berasal dari akar kata bahasa arab yang berarti meningkatkan (*al-namaa*), memurnikan (*al-taharatu*) dan keberkahan (*al-barakatu*). Dengan membayarnya (zakat), seseorang berkeinginan untuk memperoleh berkah, memurnikan, dan memupukkan perbuatan baik.

Zakat dalam istilah al-qur' an menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Menurut *lisanul arab* arti dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur' an dan Hadist. Zakat dalam Al-Qur' an juga disebutkan dengan kata *shadaqah* sehingga *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama namun memiliki arti yang sama. Kemudian kewajiban akan mengeluarkan zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang-orang-orang yang ruku’ .” (QS. Al-Baqarah:43)

Sehingga maksud arti dari sumbu dan suci sejatinya tidak hanya digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa seseorang yang mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat tersebut. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103).

Menurut Nurul, dkk (2015), makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*,

pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

B. Hadist

Selain dalil-dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an mengenai perintah zakat serta fungsinya. Adapun tertuang di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW diantara adalah sebagai berikut:

1. Hadist Riwayat Bukhari Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ، (روه البخري ومسلم)

Artinya: Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkah Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan ramadhan. (HR. Bukhari Muslim).

2. Hadsist Riwayat Ibnu Abbas

Nabi SAW mengirim Mu' az bin Jabal ke Yaman dan berkata:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلًا بِكِنَانٍ ، فَلْيُكْفِ أُولَ مَا تَدْعُوهُمْ إِنَّهُ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -
 وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُؤْخَذُوا اللَّهُ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صِنْفَةً تَتَّخِذُ مِنَ
 أَغْنِيَابِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ،
 فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

Artinya: “Kau akan berada di tengah-tengah umat ahli kitab (agama lain).

Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulnya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalannya, maka kau harus melindungi harkat kekayaan mereka itu, dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.

2.1.8 Syarat dan Rukun Zakat

A. Syarat Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat ialah medeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh bukan dari hutang, mencapai nisab, mencapai *hawl* dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat

sahnya, juga menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat tersebut.

Syarat Wajib Zakat:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.
- d. Harta yang dizakati adalah milih penuh bukan hutang
- e. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun
- f. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok

Sedangkan syarat sah zaka adalah sebagai berikut:

- a. Niat

Dalam pelaksanaan zakat, orang yang kenai kewajiban membayar zakat haruslah disertai dengan niat karena niat merupakan kunci utama dalam menunaikan zakat. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat, apabila penyerahan tersebut tidak disertai dengan niat maka dinyatakan tidak sah, karena zakat merupakan salah satu ibadah sedangkan salah satu syarat dari suatu ibadah adalah adanya niat.

- b. Tamlik (Pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya)

Tamlik menjadi salah satu syarat sah pelaksanaan zakat, yang merupakan harta zakat yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

B. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya, ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas dalam mengelola zakat (*amil*).

2.1.9 Objek Zakat

Al-Qur' an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakat dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Sehingga persoalan tersebut diserahkan kepada sunah Nabi SAW. Karena apabila ditinjau dari fungsinya, sunah Nabi SAW kemudian seperti yang diungkapkan Qardhawi (1998), bahwa sunah dapat berfungsi dalam menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, mengkhususkan yang masih terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.

Kemudian, ditemukan dalam beberapa kitab hukum (fiqih) Islam mengenai harta kekayaan yang wajib di zakati yang selanjutnya digolongkan dalam kategori; (a) emas, perak, dan uang (simpanan) yang dijelaskan dalam QS. AT-Taubah ayat 34-35 (b) barang yang diperdagangkan (c) hasil peternakan (d) hasil bumi (e) hasil tambang dan barang temuan yang semuanya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 267. Kelima jenis harta kekayaan tersebut merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat pada waktu itu (zaman Nabi).

Selaras dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 mengenai ringkasan *nisab*, *haul*, dan kadar zakat pada harta yang wajib dikenakan zakat dan berlaku di Indonesia, yaitu:

Tabel 2.1
Jenis barang, Nisab, dan Zakatnya

No	Jenia Barang	Nisab	Zakat
1.	Emas	20 dinar (94 gr murni)	2,5%
2.	Perak	200 dirham (672 gr murni)	2,5%
3.	Uang dan Surat Berharga	20 dinar (94 gr murni), 200 dirham (672 gr murni)	2,5%
4.	Perniagaan	94 gr murni	2,5%
5.	Pertanian	Biji dan buah-buahan (irigasi dan non irigasi) = 200 Dirham	Irigasi: 5 % Non- Irigasi: 10%
6.	Peternakan dan Perikanan	Sapi = 30 ekor, Kambing dan sejenisnya = 40 ekor, Unta = 5 ekor, Perikanan dan Unggas = 93,6 gr	Sapi = 1 ekor, Kambing = 1 ekor Unta = 1 ekor

			Perikanan dan Unggas = 2,5 %
7.	Pertambangan	20 dinar (94 gr murni), 200 dirham (672 gr murni)	2,5%
8.	Perindustrian	20 dinar (94 gr murni)	2,5%
9.	Pendapatan dan Jasa (Profesi)	20 dinar (94 gr murni)	2,5%
10.	Rikaz	setiap kali orang menemukan barang tersebut	20%

2.1.10 Pihak yang berhak menerima Zakat

Penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Firman Allah QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat diatas, Al-Qur’ an menjelaskan permasalahan zakat lebih ringkas dibandingkan dengan penjelasan mengenai shalat. Maka secara khusus pula Al-Qur’ an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir ayat diatas sangatlah jelas, bahwa yang berhak menerima zakat, semuanya ada delapan golongan, yaitu:

1. Golongan Fakir

Yaitu orang-orang yang sangat miskin dan hidup menderita tidak memiliki apa-apa baik harta maupun tenaga untuk memenuhi kehidupannya.

2. Golongan Miskin

Ialah orang yang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri maupun keluarganya.

3. Para Amil Zakat

Ialah mereka yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat. Kata amilum sendiri diartikan sebagai pengumpul yang bisa mencakup

semua pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagainya yang bersangkutan dalam mengelola manajemen dan administrasi dana zakat.

4. Golongan Mu' allaf

Ialah orang-orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam yang membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

5. Hamba Sahaya

Memberikan hak kepada kelompok ini yaitu dengan memberikan zakat memiliki tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

6. Orang yang Berhutang (*Gharim*)

Mereka ini adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka berhutang, bukan untuk bermewah-mewahan maupun sebab menuju kemewahan.

7. Sabilillah

Jahumur ahli fiqih berpendapat, maksud sabilillah adalah para pahlawan yang sukarela dalam perjuangannya. Sabilillah merupakan jalan yang baik berupa kepercayaan maupun amal yang

menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Sedangkan fisabilillah merupakan mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridho Allah SWT.

8. Musafir (ibnu sabil)

Ibnu sabil adalah orang-orang yang berpegian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.

2.1.11 Tujuan Zakat

Sebagai salah satu bentuk ibadah yang juga merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, hal ini bisa kita lihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek.

a. Hubungan Manusia dengan Allah

Zakat disini memiliki tujuan sebagai bentuk sarana ibadah kepada Allah SWT sebagaimana halnya sarana-sarana lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena zakat adalah pilar pokok Islam atau rukun islam yang ketiga, salah satu unsur kelima bangunan Islam. Dengan kita melaksanakan zakat maka itu berarti kita senantiasa selalu taat

dalam melaksanakan perintah Allah dan itu juga mengartikan bahwa itu merupakan sarana kita untuk makin dekat dengan Allah SWT.

b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Dengan melaksanakan zakat, mengajarkan manusia untuk bisa melepaskan sebagian dari harta miliknya, dan dengan cara perlahan-lahan. Dan zakat juga mendidik agar manusia atau diri kita tidak menganggap bahwa meraih harta merupakan satu-satunya dari tujuan hidup. Dengan demikian zakat senantiasa menjaga manusia dari kerusakan jiwa, selaras dengan makna dari zakat yang bermakna mensucikan diri. Mensucikan diri berarti mensucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, dan lain sebagainya.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia

Dalam kehidupan masyarakat, selalu terjadi ketimpangan atau perbedaan antara seseorang yang dapat dikatakan memiliki kehidupan yang berkecukupan dan ada seseorang yang hidup dengan kemiskinan. Adanya perbedaan tersebut kemudian menimbulkan rasa iri dan dengki dari orang yang hidup dengan kemiskinan kepada orang yang hidup dengan berkecukupan. Maka disinilah zakat memiliki peranan dalam memperkecil perbedaan ekonomi golongan yang miskin. Dengan demikian dapat menimbulkan keadaan ketimpangan ekonomi dapat berkurang.

d. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

Zakat merupakan bentuk penegasan bahwa harta kekayaan itu memiliki fungsi sosial. Zakat adalah pendidikan bagi manusia bahwa harta

benda itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan bentuk titipan dari Allah SWT, yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada-Nya dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama di dalam segala aspek.

2.1.12 Zakat dalam Perspektif Makro

Dari aspek makroekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilitas makroekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Sehingga hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang di produksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Kemudian hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian (Wibisino, 2015)

Dalam perekonomian yang tidak memiliki transfer pendapatan wajib dan sebagian besar penduduknya adalah miskin, maka kebutuhan riil

masyarakat yang tercermin dalam permintaan pasar. Barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat banyak, seperti pangan, papan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, sering kali tidak produksi. Dengan zakat yang mentransfer pendapatan ke orang miskin, maka permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini, sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, pengaruh zakat dalam perekonomian yang tercermin dalam indikator makro akan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan yang juga sekaligus merupakan suatu bagian dari sistem kerja makroekonomi Islami. Sistem makroekonomi Islami berbeda dengan teori makro ekonomi arus utama seperti Keynesian maupun neoklasik yang bebas nilai.

Selanjutnya, zakat dengan investasi memiliki korelasi yang positif dikarenakan tarif zakat akan dikenakan kepada aset yang tidak diinvestasikan atau dianggurkan dari proses produksi. Sehingga hal ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan pada barang dan jasa kebutuhan dasar. Menurut Choudury (1992), dana akan lebih banyak tersedia dalam investasi dan lebih sedikit dalam zakat. Akan tetapi ini tidak sepenuhnya benar karena setiap jumlah investasi produktif hari ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan di masa depan, sehingga hubungan antarwaktu (intertemporal) antara zakat dan investasi akan semakin meningkat.

Pendekatan dalam hubungan ini adalah adanya mekanisme transformasi produktif yang diaktifkan melalui zakat.

Kemudian Din (1986), berpendapat mengenai peran zakat kebijakan fiskal. Di mana dana zakat yang terkumpul dapat dibelanjakan dalam bentuk barang konsumsi dan produksi, dan rasio dari barang konsumsi terhadap barang produksi dapat digunakan sebagai instrumen fiskal. Pada masa ekspansi, rasio ini turun seiring zakat dibelanjakan lebih banyak untuk produksi. Adapun pada periode resesi, rasio ini akan meningkat dengan seiring belanja zakat diarahkan pada barang konsumsi, sehingga akan menghasilkan dampak ekspansioner untuk pemulihan. Sehingga zakat dikatakan sebagai *automatic fiscal stabilizers*, yang mana zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang akan menurunkan dampak pengganda sehingga mengurangi fluktuasi output secara otomatis.

Disaat yang sama, dana zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin sehingga membuat konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Dengan demikian kombinasi fungsi zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian

2.1.13 Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Kata infaq dapat berarti juga mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau abdan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Atau juga infaq dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.

Apabila dalam zakat terdapat ketentuan *nishab* tertentu, berbeda dengan infaq yang tidak memiliki ketentuan *nishab*. Namun dalam bentuk yang dikeluarkan dalam berinfaq sama dengan zakat yaitu berupa harta atau materi. Kemudian dalam hal orang yang berhak menerima infaq ini berbeda dengan zakat yang terdapat 8 golongan yang berhak menerima, namun dalam infaq diutamakan kepada keluarga, kerabat, barulah kepada orang ataupun lembaga yang sangat membutuhkan.

2.1.14 Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam arti sejalannya antara perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Kata shadaqah berasal dari tiga huruf yaitu *sha-dal-qaf*, yang bermakna membantu terwujudnya sesuatu. Kata shadaqah dalam berbicara berarti ‘benar’ dan kata *ashadaqa* yang ditunjukkan untuk perempuan berarti membayar mahar.

Menurut Qardhawi (1998), maka shadaqah dalam Al-Qur’ an dikaitkan dengan kata-kata memberi, ketaqwaan, membenarkan, kikir dan dusta. Dengan demikian, *shadaqah* bisa diartikan sebagai bukti atas kebenaran iman dan membenarkan adanya hari pembalasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Kata *shadaqah* juga dapat diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah SWT, bukan sebagai penghormatan. Sehingga secara umum dapat diartikan sebagai pemberian seorang muslim yang secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan yang mengharap ridha Allah SWT. Selain itu terdapat beberapa persamaan antara shadaqah dan infaq yang dilihat dari nishab, haul, dan siapa yang berhak menerima shadaqah tersebut. Namun yang membedakan adalah hukum dalam infaq hukum nya adalah sunnah wajib, sedangkan dalam shadaqah hukumnya secara umum adalah Sunnah. Dan perbedaan dari segi bentuk dalam infaq

berbentuk harta atau materi, sedangkan bentuk shadaqah tidak hanya harta tau materi tetapi non materi.

2.1.15 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM antara lain sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu dari kemajuan suatu bangsa. Bahkan pendidikan merupakan sarana paling efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogike* yang berasal dari kata majemuk *pais* yang berarti anak dan kata *ago* yang berarti aku bimbing, jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Sehingga artinya orang yang memiliki pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut *paedagogos*. Jadi pendidikan merupakan salah satu usaha untuk membimbing anak.

Sedangkan pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekeuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatm bangsa, dan Negara.

Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan, baik disekolah maupun luar sekolah dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap memasukan satuan-satuan pendidikan. Yang kemudian penilaian tingkat pendidikan yang dilihat dari masalah partisipasi pendidikan yaitu:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Adalah perbandingan jumlah siswa pada tingka pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK juga merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

2.1.16 Kesehatan

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 1992 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan seseorang sendiri tidak hanya diukur melalui aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi dapat diukur dari produktivitasnya dalam arti memiliki pekerjaan atau menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja seperti anak-anak maupun remaja, seseorang yang sudah tidak bekerja (pensiun) maupun usia lanjut, yakni memiliki kegiatan seperti sekolah atau kuliah bagi anak-anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia.

Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang sangat penting dikalangan masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya dalam mencapai kesehatan yang optimal, keluarga mandiri, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan juga merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan serta bantuan demi terwujudnya suatu Negara yang sehat dan sejahtera, karena salah satu

kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan minimal dalam bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan kesehatan dasar.

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan No.36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Menurut Depkes (1991), puskesmas adalah suatu organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan serta menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan nasional di tingkat pertama memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat ataupun perseorangan diwajibkan berupaya sesuai dengan ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global serta memiliki daya tinggi untuk penyelenggaraan derajat kesehatan.

2.1.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A. Pengertian

Sumber daya manusia dari suatu bangsa tidak dinilai dari modal fisik maupu sumber daya material yang dimilikinya, tetapi dilihat dari faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro, 2002). Sejarah mencatat bahwa Negara yang menerapkan patron pembangunan dengan persepektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melmpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Oleh karena itu tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami *diminishing return* tapi hal tersebut tidak berlaku bagi ilmu pengetahuan (Kuncoro, 1997).

Pembangunan manusia mempunyai arti luas, namun ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi. Sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu manusia harus diposisikan sebagai potensi kekayaan bangsa, sehingga pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktid (*Human Development Report, 1990*).

Menurut *United Nations Development Program* (1995), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the unlimited end*) sedangkan upaya pembangunan di pandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu; produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

1. Produktivitas

Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untu memperoleh akses tersebut harus dihapus sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa di perbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya sekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran per- kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0 – 100. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilakukan setiap tahun dan manfaat perhitungan IPM diantaranya adalah (Feriyanto, 2014):

- a. Sebagai salah satu indikator untuk perbandingan relatif kinerja antar daerah di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk menentukan peringkat Provinsi dan Kabupaten/kota dalam keberhasilan pembangunan manusia di wilayahnya.

- b. Sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah baik secara total (IPM) ataupun perkembangan indeks masing-masing komponen IPM.
- c. Sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar terpacu menaikkan peringkatnya, melalui pemanfaatan sumber daya dan penentuan prioritas program peningkatan kualitas hidup manusia.
- d. Sebagai salah satu kriteria untuk penentuan besarnya alokasi dana bantuan pembangunan manusia dari pusat ke daerah.
- e. Sebagai indikator kajian untuk mengukur kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah terkait dengan hasil-hasil pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran peningkatan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya

B. Komponen- Komponen IPM

a. Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Indeks harapan hidup atau disebut juga dengan lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat dikut dengan indeks harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kemarian per tahunnya dimana variabel tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat.

b. Indeks Pendidikan

Komponen pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kedua indikator ini diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Semakin banyak masyarakat yang melek huruf dan semakin lama mengikuti pendidikan sekolah di harapkan akan semakin meningkatkan kualitas masyarakat dalam penguasaan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Angka melek huruf di peroleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu; partisipasi sekolah, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang di tamatkan.

c. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur standar hidup layak atau daya beli, UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan riil per kapita *GDP adjusted*. Untuk mengukur daya beli penduduk antar Provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antat waktu uyang di sesuaikan dengan indeks *Purchasing Power Parity (PPP)*.

2.1.18 Zakat dan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Susmodiningrat (2002), zakat merupakan bagian dari upaya memberdayakan masyarakat mustahik yang dapat dilihat dari tiga sisi; *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Poin penting dari sisi ini adalah bahwa setiap manusia, mustahik, memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Artinya tidak ada mustahik yang sama sekali tanpa daya, oleh karena itu pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki mustahik (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah yang nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang aja membuat mustahik menjadi memiliki daya. Seperti halnya melalui pendidikan, zakat dapat mengubah kondisi fiskal melalui pengetahuan dan keterampilan mustahik yang dengan demikian dapat meningkatkan kualitas tenaga maupun kuantitas tenaga kerja yang bisa ditawarkan. Sehingga di harapkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dapat mendukung meningkatnya sektor-sektor produktif. Tidak hanya melalui pendidikan, dalam mendukung meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja, pengelolaan zakat di arahkan kepada bidang kesehatan, melalui program-program yang berhubungan dengan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat mendukung kondisi kesehatan

mustahik agar lebih baik sehingga dapat sejalan dengan meningkatkan produktivitas. *Ketiga*, memberdayakan dalam arti melindungi. Artinya dalam proses pemberdayaan, harus menjadikan mustahik yang lemah dalam kekurangberdayaan agar menjadi kuat.

Yang kemudian konsep pemberdayaan dalam zakat diberlakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) selaku institusi yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Karena pada dasarnya konsep zakat yang diberlakukan di dalam institusi pengelolaan zakat memiliki tiga dimensi pokok, yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Ketiga dimensi ini memiliki keterkaitan dengan parameter pengembangan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, oleh karenanya zakat yang dikelola oleh institusi-institusi pengelola zakat ini semakin berperan dan menjadi salah satu instrumen yang mendukung pembangunan manusia.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Akram dan Afzal (2014) <i>“Dynamic Role of zakat in Allevating Poverty: A Case Study of Pakistan ”</i>	Dependen Kemiskinan Independen 1. Zakat 2. GDP 3. Inflasi 4. Tingkat Pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara kemiskinan dengan pembayaran zakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2.	Rédha dkk ., (2016) <i>“ The Impact of Zakat Funds in Reducing Poverty Case of Algeria ”</i>	Dependen Kemiskinan Independen 1. IPM 2. Tingkat Pengangguran 3. Zakat 4. Jumlah Proyek yang dibiayai dana zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat Aljazair membantu menciptakan bisnis baru yang berpengaruh pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan, namun kontribusinya dalam hal ini masih kecil.
3.	Nurjanah dkk., (2019) <i>“ The Impact of Economic Growth and Distribution of Zakat Funds on</i>	Dependen Kemiskinan Independen 1. PDRB 2. Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi dana zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan

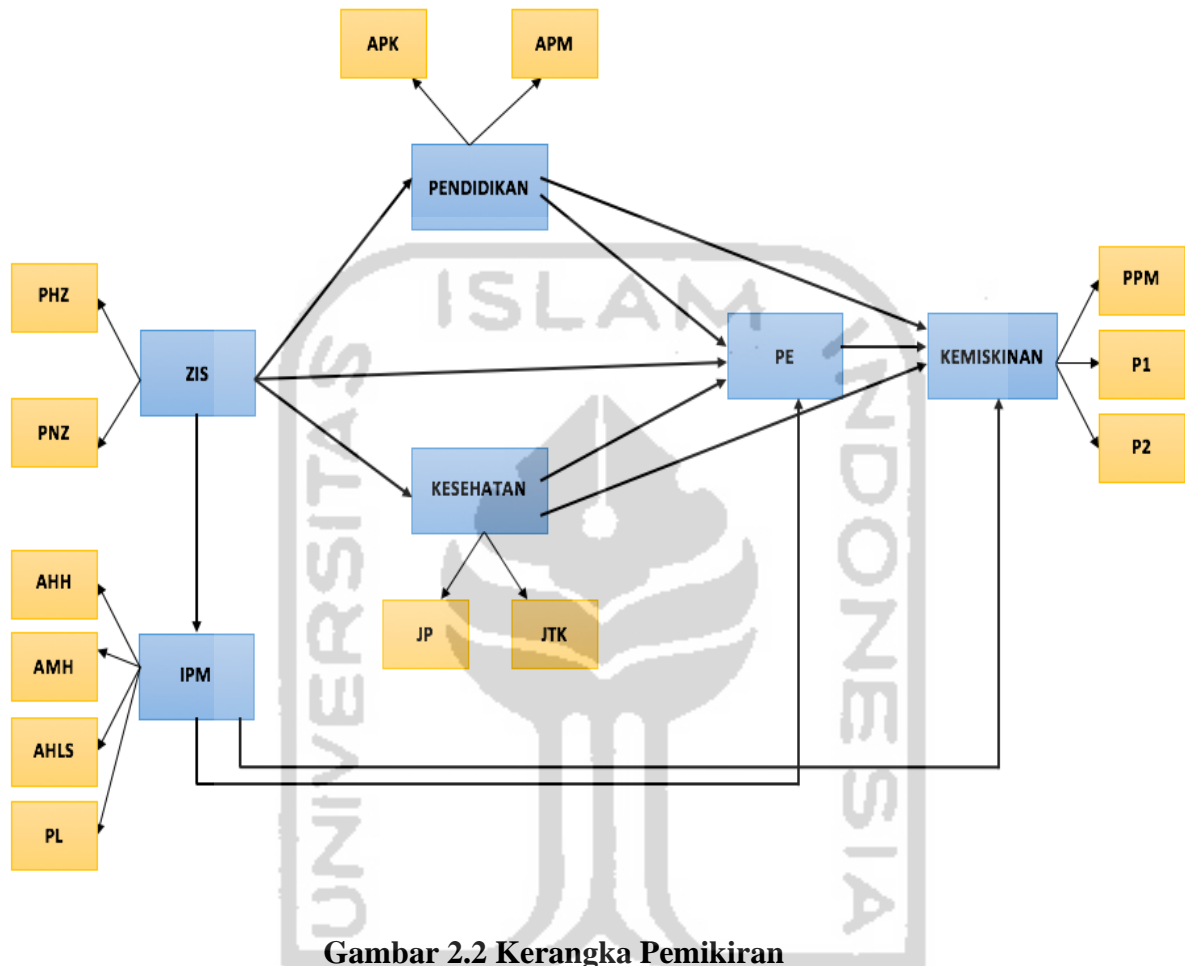
	<i>Poverty (Survey in the Third District of West Java Province Period 2011-2016)</i> ”		signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan distribusi dana zakat secara parsial tidak memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin
4.	Nisthar dkk., (2018) “ <i>A Comparative Analysis of The Relationship of Nature of Poverty With Zakat Collection and Real Gross Domestic Product: An Empirical Study in The Context of Malaysia</i> ”	Dependen Persentase Penduduk Miskin Independen 1. Zakat 2. PDB riil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengentasan kemiskinan dan pengumpulan zakat dan PDB riil. Satu persen kenaikan pengumpulan zakat menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 3,12 unit di Malaysia. Dan satu persen kenaikan dalam tingkat pertumbuhan riil di Malaysia menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0,032.
5.	Athoillah (2018) “ <i>The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in The Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012</i> ”	Dependen 1. PDRB 2. Tingkat Pengangguran 3. Jumlah Penduduk Miskin Independen 1. Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai variabel kontrol, diperoleh temuan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; zakat berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran; dan zakat

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Angka Harapan Hidup (AHH) 3. Angka Partisipasi Murni (APM) 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
6.	<p>Abdelmawla (2014)</p> <p><i>“ The Impacts Zakat Knowledge on Poverty Alleviation in Sudan: An Empirical Investigation (1990-2009)</i></p>	<p>Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penduduk Miskin <p>Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Pendidikan 3. Literasi 	<p>Hasil menunjukkan bahwa zakat dan pendidikan berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan di Sudan. Studi ini merekomendasikan peningkatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu meningkatkan persentase pengeluaran untuk orang miskin dari total dana zakat sangat dianjurkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan.</p>

7.	Khasandy & Badrudin (2019) <i>“The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society In Indonesia ”</i>	Dependen 1. Zakat Independen 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. IPM 3. Persentase Penduduk Miskin 4. Indeks Gini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat di Indonesia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki nilai negatif terhadap IPM dan Indeks Gini, tetapi memiliki nilai positif terhadap persentase penduduk miskin.
8.	Kareem & Bankole (2016) <i>“ Zakah, Poverty Alleviation, and Inclusive Growth in Nigeria ”</i>	Dependen 1. Pertumbuhan PDB 2. PDB per-Kapita Independen 1. Zakat 2. Pengurangan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase peningkatan pemberdayaan zakat mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,3888 persen, namun Sementara koefisien zakat terhadap pengentasan kemiskinan positif, artinya semakin banyak zakat yang diberikan terhadap pengentasan kemiskinan maka semakin lebih baik kesejahteraan di Nigeria. Hasil lebih lanjut menungkapkan bahwa peningkatan zakat terhadap pengentasan kemiskinan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,234 persen.

9.	Mohammed Dkk., (2019) “ <i>Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia?</i> ”	Dependen 1. Presentase Penduduk Miskin 2. Pengangguran Independen 1. PDB 2. Zakat	Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara zakat, PDB, dengan kemiskinan di Selangor yang di ukur dengan OLS. Namun sebaliknya untuk pengangguran, terdapat hubungan negatif dan signifikan dengan pengumpulan zakat dan PDB.
10.	Senandji dkk., (2015) “ <i>The Impact of Zakat on Income Inequality and Poverty in Malaysia: A Panel Data Analysis</i> ”	Dependen 1. Kemiskinan Independen 1. Zakat 2. PDB 3. Ketimpangan Pendapatan	Hasil menunjukkan bahwa zakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Malaysia.
11.	Suprayitno dkk., (2017) “ <i>Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia</i> ”	Dependen 1. IPM Independen 1. Zakat	Hasil temuan menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di lima wilayah Negara Malaysia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Zakat di Malaysia dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat merangsang pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

PHZ = Penghimpunan ZIS

PNZ = Penyaluran ZIS

PPM = Presentase Penduduk Miskin

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

APK = Angka Partisipasi Kasar

APM = Angka Partisipasi Murni

JP = Jumlah Puskesmas

JTK = Jumlah Tenaga Kesehatan

AHH = Angka Harapan Hidup

AMH = Angka Melek Huruf

AHLS = Angka Harapan Lama Sekolah

PL = Pengeluaran

PE = Pertumbuhan Ekonomi

2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, landasan teori, dan telaah pustaka dari beberapa peneliti terdahulu yang telah di kemukakan sebelumnya maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis. Adapun beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel X2 (Pendidikan)
2. Hipotesis 2: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel X3 (Kesehatan)
3. Hipotesis 3: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel X4 (IPM)
4. Hipotesis 4: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1 (Pertumbuhan Ekonomi)

5. Hipotesis 5: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y2 (Kemiskinan)
6. Hipotesis 6: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) melalui variabel X2 (Pendidikan)
7. Hipotesis 7: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) melalui variabel X3 (Kesehatan)
8. Hipotesis 8: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) melalui variabel X4 (IPM)
9. Hipotesis 9: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X2 (Pendidikan)
10. Hipotesis 10: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X3 (Kesehatan)
11. Hipotesis 11: Variabel X1 (ZIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X4 (IPM)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai variabel laten endogen ZIS (X1), Pendidikan (X2), Kesehatan (X3), IPM (X4), Pertumbuhan Ekonomi (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2) di Provinsi Aceh. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah ZIS (X1), Pendidikan (X2), Kesehatan (X3), IPM (X4), Pertumbuhan Ekonomi (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2) 23 Kab/Kota Provinsi Aceh periode 2011 sampai 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diolah oleh orang lain atau lembaga pengumpul data yang kemudian di publikasikan kepada masyarakat secara resmi. Sehingga data tersebut dapat akses oleh seluruh pihak yang berkepentingan atau membutuhkan. Dengan demikian, penulis memperoleh data penelitian ini melalui instansi yang menyediakan dengan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel laten eksogen yang terdiri dari ZIS (X1) dengan indikator Penerimaan ZIS (X1.1) dan Penyaluran ZIS

(X1.2), Pendidikan (X2) dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) (X2.1) dan Angka Partisipasi Murni (APM) (X2.2), Kesehatan (X3) dengan indikator Jumlah Puskesmas (X3.1) dan Jumlah Tenaga Kesehatan (X3.2), IPM (X4) dengan indikator Angka Harapan Hidup (X4.1), Angka Melek Huruf (X4.2), Angka Harapan Lama Sekolah (X4.3), dan Pengeluaran (X4.4). Dan variabel laten endogen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dan Kemiskinan (Y2) dengan indikator Presentase Penduduk Miskin (Y2.1), Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y2.2), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y2.3) di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2011-2018. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel.

Adapun sumber data penelitian ini, data Kemiskinan, PDRB, Kesehatan, IPM, diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik, (BPS), data Pendidikan diperoleh dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta data Penerimaan dan Penyaluran ZIS diperoleh dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Aceh yaitu Baitul Mal Aceh.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data

No	Variabel	Satuan	Sumber Data
1	Penerimaan ZIS (X1.1)	Rupiah	Baitul Mal Aceh
2	Penyaluran ZIS (X1.2)	Rupiah	Baitul Mal Aceh
3	APK (X2.1)	Persen (%)	Kemendikbud
4	APM (X2.2)	Persen (%)	Kemendikbud
5	Jumlah Puskesmas (X3.1)	Unit	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)

6	Jumlah Tenaga Kesehatan (X3.2)	Orang	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
7	Indikator Harapan Hidup (X4.1)	Tahun	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
8	Angka Melek Huruf (X4.2)	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
9	Angka Harapan Lama Sekolah (X4.3)	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
10	Pengeluaran (X4.4)	Rupiah	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
11	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Rupiah	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
12	Persentase Penduduk Miskin (Y1)	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y2)	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)
14	Indeks Keparahan Kemiskinan (Y3)	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan data sekunder. Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka data yang digunakan haruslah diperoleh dengan metode yang tepat.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu, penelitian kepustakaan juga untuk mencari informasi seputar penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat berupa buku, artikel, jurnal serta literatur-literatur yang masih berkaitan dengan tema penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diolah oleh orang lain atau lembaga pengumpul data yang kemudian di publikasikan kepada masyarakat secara resmi. Sehingga data tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan atau membutuhkan. Dengan demikian, penulis memperoleh data penelitian ini melalui instansi yang menyediakan dengan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga-lembaga resmi yang berwenang mempublikasi data meliputi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Baznas Baitul Mal Aceh.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan spesifikasi penelitian dalam menentukan dan mengukur variabel. Spesifikasi yang dimaksud menunjukkan indikator dari variabel penelitian yang di peroleh melalui studi pustaka dan pengamatan penelitian terdahulu.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel ZIS (X1), Pendidikan (X2), Kesehatan (X3), IPM (X4), Pertumbuhan Ekonomi (Y1), dan Kemiskinan (Y2).

a. Kemiskinan (Y2)

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Di dalam penelitian ini, indikator kemiskinan adalah:

1. Persentase Penduduk Miskin (Y2.1) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y2.2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Y2.3) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

b. Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

PDRB atas dasar harga konstan, untuk PDRB atas harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

c. ZIS (X1)

Zakat, Infaq, Shadaqah yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk dana zakat dan kemudian akan di salurkan pada pihak tertentu.

Dalam penelitian ini, indikator zakat adalah

1. Penerimaan Zakat (X1.1) yaitu seluruh dana zakat yang di peroleh dari *muzzaki*.
2. Penyaluran Zakat (X1.2) yaitu seluruh dana zakat yang di peroleh dari *muzzaki* yang di salurkan kepada *mustahik*.

d. Pendidikan (X2)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut.

Dalam penelitian ini, indikator pendidikan adalah:

1. Angka Partisipasi Kasar (X2.1) adalah Adalah perbandingan jumlah siswa pada tingka pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

2. Angka Partisipasi Murni (X2.2) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

e. Kesehatan (X3)

Pembangunan kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berjalan baik, maka secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penelitian ini, Indikator Kesehatan adalah:

1. Jumlah Puskesmas (X3.1) adalah jumlah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan.
2. Jumlah Tenaga Kesehatan (X3.2) adalah jumlah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung

f. IPM (X4)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, indikator IPM adalah:

1. Angka Harapan Hidup (X4.1) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Angka Melek Huruf (X4.2) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf lainnya.
3. Angka Harapan Lama Sekolah (X4.3) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
4. Pengeluaran (X4.4) adalah rata-rata konsumsi komoditi terpilih dari survey sosial ekonomi nasional dan di bandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

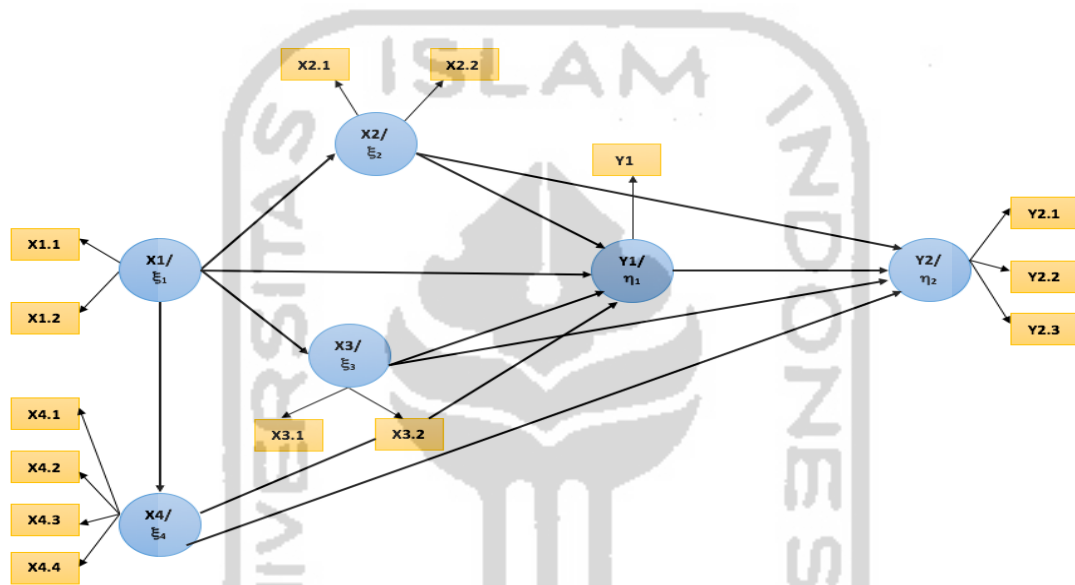
3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode analisis *Struktural Equation modeling* dengan jenis *Partial Least Square* (SEM-PLS) dan di olah dengan menggunakan *software* Smart PLS versi 3.2.8. Menurut Hartono (2010), Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun data, atau mengukur data, mengolah data, menyajikan data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Biasanya statistik deskriptif berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya.

Menurut Hair et al (2013) *Structural Equation Modeling* adalah teknik multivariate yang menggabungkan aspek analisis faktor dan jalur, yang mana memungkinkan peneliti untuk dapat secara simultan memeriksa hubungan antar peubah manifest (indikator) dan peubah laten, serta antar peubah laten. Terdapat berbagai macam metode yang digunakan saat mengembangkan SEM, salah satunya adalah *partial least square* (PLS). *Partial Least Square* merupakan persamaan structural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model structural. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan model structural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. PLS pada SEM dapat menangani semua jenis data dari non-parametrik hingga parametrik dengan asumsi minimal tentang karakteristik data untuk mengembangkan atau membangun teori. Pengujian dengan SEM PLS bertujuan untuk memaksimalkan penjelasan pada varian konstruk laten endogen (peubah endogen) dan meminimalkan varian yang tidak dapat dijelaskan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakannya PLS dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut adalah: PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel yang tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan *residual distribution*, PLS dapat digunakan untuk prediksi, PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori (Ghozali, 2014)

Variabel laten yang dibentuk dalam SEM-PLS, indikatornya dapat berbentuk reflektif maupun formatif. Dalam penelitian ini indikatornya berbentuk reflektif yang merupakan indikator yang bersifat manifesti terhadap konstruk dan sesuai dengan *classical test theory* yang mengasumsikan bahwa *variance* di dalam pengukuran *score* variabel laten merupakan fungsi *true score* di tambah dengan *error*.



Gambar 3.1 Diagram Path

Berdasarkan diagram path atau diagram jalur pada gambar 3.1 diperoleh persamaan struktural untuk model pengukuran. Dan persamaan structural untuk model pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Persamaan *Outer Model*

- a. Variabel Endogen 1 (Reflektif): Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

$$Y1 = \lambda Y1 \eta_1 + \varepsilon Y1$$

- b. Variabel Endogen 2 (Reflektif): Kemiskinan (Y2)

$$Y_{2.1} = \lambda Y_{2.1} \eta_2 + \varepsilon Y_{2.1}$$

$$Y_{2.2} = \lambda Y_{2.2} \eta_2 + \varepsilon Y_{2.2}$$

$$Y_{2.3} = \lambda Y_{2.3} \eta_2 + \varepsilon Y_{2.3}$$

c. Variabel Eksogen 1 (Reflektif): ZIS (X1)

$$X_{1.1} = \lambda X_{1.1} \xi_1 + \delta X_{1.1}$$

$$X_{1.2} = \lambda X_{1.2} \xi_1 + \delta X_{1.2}$$

d. Variabel Eksogen 2 (Reflektif): Pendidikan (X2)

$$X_{2.1} = \lambda X_{2.1} \xi_2 + \delta X_{2.1}$$

$$X_{1.2} = \lambda X_{2.2} \xi_2 + \delta X_{2.2}$$

e. Variabel Eksogen 3 (Reflektif): Kesehatan (X3)

$$X_{3.1} = \lambda X_{3.1} \xi_3 + \delta X_{3.1}$$

$$X_{3.2} = \lambda X_{3.2} \xi_3 + \delta X_{3.2}$$

f. Variabel Eksogen 4 (Reflektif): IPM (X4)

$$X_{4.1} = \lambda X_{4.1} \xi_4 + \delta X_{4.1}$$

$$X_{4.2} = \lambda X_{4.2} \xi_4 + \delta X_{4.2}$$

$$X_{4.3} = \lambda X_{4.3} \xi_4 + \delta X_{4.3}$$

$$X_{4.4} = \lambda X_{4.4} \xi_4 + \delta X_{4.4}$$

2. Persamaan *Inner Model*

Secara matematis dapat di tulis sebagai berikut:

$$\eta_1 = f(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$$

$$\eta_2 = f(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$$

Fungsi-fungsi tersebut kemudian dapat dijabarkan:

$$\eta_1 = \gamma_{11} \xi_1 + \gamma_{21} \xi_2 + \gamma_{31} \xi_3 + \gamma_{41} \xi_4 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma_{12} \xi_1 + \gamma_{22} \xi_2 + \gamma_{32} \xi_3 + \gamma_{42} \xi_4 + \zeta_2$$

Keterangan:

λ = Faktor Loading

ε, δ = Residual diantara variabel laten dan indikatornya

ξ = Variabel Eksogen laten

η = Variabel Endogen Laten

γ = Path Coefficient antara variabel eksogen laten dan variabel endogen laten

ζ = Model Residual

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y2.1 = Persentase Penduduk Miskin

Y2.2 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

Y2.3 = Indeks Keparahan Kesmiskinan

X1.1 = Penerimaan ZIS

X1.2 = Penyaluran ZIS

X2.1 = Angka Partisipasi Kasar (APK)

X2.2 = Angka Partisipasi Murni (APM)

X3.1 = Jumlah Puskesmas

X3.2 = Jumlah Tenaga Kesehatan

X4.1 = Angka Harapan Hidup (AHH)

X4.2 = Angka Melek Huruf (AMH)

X4.3 = Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

X4.4 = Pengeluaran

3.7 Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis menggunakan SEM-PLS setidaknya harus melalui lima tahapan di mana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya, yaitu:

1. Konseptualisasi Model

Dengan tahapan yang terdiri dari spesifikasi domain konstruk, menentukan *item* yang merepresentasikan konstruk, pengumpulan data untuk dilakukan uji pretest, purifikasi konstruk, pengumpulan data baru, uji reliabilitas, uji validitas, dan menentukan skor konstruk.

2. Menentukan Metode Analisis Algorithm

Dalam SEM-PLS menggunakan program Smart PLS 3.2.8, metode analisis algorithm yang disediakan dengan tiga pilihan skema yaitu, factorial, centroid, dan path atau structural weighting.

3. Menentukan Metode Resampling

Terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk proses penyampelan kembali (*resampling*) yaitu bootstrapping dan jackknifing. Metode jackknifing hanya menggunakan subsample dari sampel asli yang dikelompokkan dalam group untuk melakukan resampling kembali. Sedangkan metode bootstrapping menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan resampling kembali.

4. Menggambar Diagram Jalur

Falk dan Miller (1992), merekomendasikan untuk menggunakan prosedur *nomogram rectangular action modeling* (RAM) dengan ketentuan; a. Konstruksi teoritikal yang menunjukkan variabel laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips, b. Variabel observed atau indikator harus digambar dalam dengan bentuk kotak, c. Hubungan-hubungan asimetri digambarkan dengan arah panah tunggal, d. Hubungan-hubungan simetris digambarkan dengan arah panah double.

5. Evaluasi Model

Evaluasi model dalam SEM-PLS menggunakan program Smart PLS 3.2.8 dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model (*measurement model*) yaitu melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Kemudian dianjurkan dengan evaluasi model struktural dan pengujian signifikansi untuk menguji pengaruh antar konstruk atau variabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Aceh

4.1.1 Latar Belakang

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh di mulai pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5/1973 tentang Pembentukan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah pada tahun 1975 dan menjadi Badan Harta Agama (BPHA). Dan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di provinsi Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang berbeda dengan BAZIS yang berada di daerah lain, di mana daerah lain terdapat BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan, sedangkan BAZIS yang ada di Provinsi Aceh terdiri dari BAZIS Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong atau Kelurahan.

Kemudian perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dilakukan melalui Keputusan Gubernur No.18/2003 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov.NAD, yang mulai beroperasi pada Januari 2004. Selanjutnya, melalui Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Yang Amanah, Transparan dan Kredibel

2. Misi

- Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzzaki, Mustahik dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian warisan
- Meningkatkan *Assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

4.1.3 Legal Formal

- UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Hal Penyelenggaraan Syariat Islam: Baitul Mal adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD.
- UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan uu Nomor 23 tahun 2011.
- UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kab/Kota pada Pemerintah Aceh.
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 02 tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitu Mal Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat.

4.1.4 Struktur Organisasi

- a. Gubernur Aceh
 - b. Sekretaris Daerah Aceh
 - c. Kepala Baitul Mal Aceh
 - d. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh
- Ketua

- Sekretaris
- Anggota
- Kabid Pengawasan
- Kasubbid monitoring dan Evaluasi
- Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi
- e. Kabid Pengumpulan
 - Kasubbid Invetastris dan Pendataan
 - Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
- f. Kabid Sosialisasi dan Pengembangan
 - Kasubbid Sosialisasi
 - Kasubbid Pengembangan
- g. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Kasubbid Pendistribusian
 - Kasubbid Pendayagunaan
 - Kabid Perwalian
 - Kasubbid Hukum dan Advokasi
 - Kasubbid Sertifikasi dan Pewalian
- h. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh
- i. Kepala Bagian Umum
 - Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - Kasubbag Program dan Perencanaan
 - Kasubbag Kepegawaian

- j. Kepala Bagian Keuangan
 - Kasubbang Anggaran
 - Kasubbang Verifikasi dan pembendaharaan
 - Kasubbang Pembukuan dan Pelaporan
- k. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Umat
 - Kasubbang Hukum
 - Kasubbang Hubungan Umat
 - Kasubbang Persidangan dan Risalah

4.1.5 Program-Program Baitul Mal Aceh

A. Pendidikan

Program pendidikan yang dilaksanakan di baitul mal Aceh berlangsung sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan Muafaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar atau mahasiswa dari mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi, termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin atau anak yakim. Dan untuk kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Terdapat tiga jenis program pendidikan yang ada di Baitul Mal Aceh yaitu; Beasiswa Penuh, Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Bantuan Keuangan Sekali Waktu.

1. Beasiswa Penuh

a. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan Al-Qur' an sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga miskin. Sasaran penerima beasiswa penuh ialah calon siswa tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa aktif di perguruan tinggi dari keluarga miskin yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan bekeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program tahfidz Al Quran.

b. Beasiswa Penuh Anak Muallaf dari Daerah Rawan Aqidah

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman Islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya serta lahirnya da' i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar Islam di daerah rawan aqidah. Kemudian anak dari keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Provinsi Aceh. Sasaran penerima Beasiswa Penuh Anak Muallaf adalah pelajar tingkat SMP dan SMA dari keluarga muallaf yang tinggal di wilayah rawan aqidah.

c. Beasiswa Tingkat Mahasiswa

Program ini diberikan kepada pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dan dari keluarga miskin, dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui

pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi program D3 pada kampus yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Bantuan pendidikan ini bertujuan untuk meringankan kepala keluarga dalam menyediakan biaya pendukung pada kegiatan belajar. Bantuan pendidikan berupa uang saku yang diberikan setiap bulannya sampai wajib belajar menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu. Bantuan ini kemudian akan diberikan kepada dua kelompok yaitu; bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga miskin dan untuk anak dari keluarga muallaf.

3. Bantuan Pendidikan Sekali Waktu

a. Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Menyelesaikan Tugas Akhir

Bantuan pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir.

B. Sosial

1. Program Fakir Uzur

a. Santunan Fakir Uzur Seumur Hidup

Yaitu pemberian santunan kepada fakir uzur selama seumur hidup. Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp 300.000, bantuan ini bertujuan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.

2. Bantuan Alat Kesehatan

Yaitu dengan memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari fakir uzur yang dibina oleh Baitul Mal Aceh. Bantuan alat kesehatan tersebut yaitu kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar.

Program ini menyasar rumah tangga miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan papan (rumah) yang layak huni. Melalui program ini Baitul mal Aceh memberikan bantuan dana kepada mustahik untuk merehab dan membangun bagian rumah yang perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga rumah yang mustahik temapati mejadi layak sebagai tempat tinggal. Program ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang alokasi kuotanya disesuaikan dengan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

3. Pembangunan Rumah Fakir Miskin Aceh

Program ini menyasar rumah tangga miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan papan (rumah) yang layak huni. Melalui program ini Baitul mal Aceh memberikan bantuan dana kepada mustahik untuk merehab dan membangun bagian rumah yang perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga rumah yang mustahik temapati mejadi layak sebagai tempat tinggal. Program ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang alokasi kuotanya disesuaikan dengan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

4. Santunan Ramadhan

Program ini menysasar rumah tangga miskin yang mengalami kesulitan dalam menghadapi puasa Ramadhan. Dengan santunan ini diharapkan bahwa kebutuhan pokok keluarga miskin setidaknya terpenuhi selama bulan suci ramdhan dan mereka bisa menjalaninya dengan lancar dan nyaman.

5. Sunatan Masal

Program ini membantu anak-anak dari masyarakat miskin dalam melaksanakan khitanan. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan Mitra Baitul Mal Aceh yaitu Rumah Zakat Indonesia Cabang Aceh.

6. Bantuan Anak Yatim

Program ini berupa santunan kepada 100 orang anak yatim/piatu/yatim piatu dari keluarga miskin di kab/kota Provinsi Aceh dalam membantu meringankan beban biaya hidup mereka dan bagi keluarga yang merawatnya.

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Program ZIS Produktif

Yaitu mengola zakat kearah produktif denga memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, prooduktif dan mandiri. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Bentuk bantuannya adalah pemberian modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak atau qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Harapannya kemudahan yang diberikan ini mampu menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada renternir.

2. Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada Baitul mal Gampong (Kelurahan) untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di Gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong, guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang tinggal di wilayah kerja Baitul Mal Gampong.

3. Bantuan Alat-Alat Kerja

Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan para mustahik yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Program ini untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang digeluti. Program ini dibagi dalam lima sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan.

4. Pelatihan Life Skill

Yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh Baitul mal Aceh dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pelatihan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mandiri. Pelatihan ini juga merupakan pilihan alternative pendidikan non formal bagi remaja atau pemuda yang putus sekolah. Pelatihan life skill ini terdiri dari; Pelatihan babby sitter, pelatihan komputer, pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus dan pelatihan keterampilan berkarakter

D. Dakwah dan Syiar Islam

1. Pembinaan Muallaf Didaerah Rawan Akidah

Kegiatan ini adalah pendampingan syariah yang bertujuan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf yang tinggal di daerah rawan akidah.

2. Renovasi Mesjid Didaerah Rawan Akidah

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung para muallaf yang tinggal di daerah rawan akidah untuk melakukan ibadah dan sebagai sarana untuk memperkuat akidah.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan) dari masing-masing variabel, (Ghozali, 2011).

Hasil pengujian statistik deksriptif, diperoleh hasil pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Standard Deviation
Y1	4949362.587	774469	18151766	3911307.994
Y2.1	17.721	7.25	25.43	3.908
Y2.2	2.892	0.88	5.94	0.938
Y2.3	0.765	0.23	2.15	0.325
X1.1	6395525865	984918944	23145026733	4942893462
X1.2	5252956667	97781500	20636104993	4372137744
X2.1	78.484	53.04	135.09	13.832
X2.2	57.122	36.67	84.26	9.51
X3.1	14.891	5	44	7.682
X3.2	49.989	3	475	49.177
X4.1	67.548	62.83	71.27	2.285
X4.2	97.242	87.89	100	2.324
X4.3	13.687	1.76	17.26	1.502
X4.4	8442.647	10043	25917	2258.932

Sumber: Perhitungan SmartPLS 3.2.8

1. Variabel PDRB Menurut Harga Konstan (Y1) sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar Rp 4.949.362,587 juta dengan nilai maksimum Rp 1.815.176 juta dan nilai minimum sebesar Rp 774.469 juta. Dengan standar deviasi Rp 3.911.307,994 juta yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Y1 adalah + Rp 3.911.307,994 sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Y1 adalah - Rp 3.911.307,994.
2. Variabel Presentase Penduduk Miskin (Y2.1) memiliki nilai mean atau rata-rata 17,72% dengan nilai maksimum 25,43% dan nilai minimum 7,25%. Dengan standar deviasi 3,908, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Y2.1 adalah + 3,908%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Y2.1 adalah -3,908%.
3. Variabel Indeks Keparahan Kemiskinan (Y2.2) memiliki nilai mean atau rata-rata 2,892% dengan nilai maksimum 5,94% dan nilai minimum 0,88%. Dengan standar deviasi 0,938%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Y2.2 adalah + 0,938%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Y2.2 adalah -0,938%.
4. Variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y2.3) memiliki nilai mean atau rata-rata 0,765 % dengan nilai maksimum 2,15% dan nilai minimum 0,23%. Dengan standar deviasi 0,325%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Y2.1 adalah + 0,325%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Y2.1 adalah -0,325%.

5. Variabel Penghimpunan ZIS (X1.1) memiliki nilai mean atau rata-rata Rp 6.395.525.865 dengan nilai maksimum Rp 23.145.026.733 dan nilai minimum Rp 984.918.944. Dengan standar deviasi Rp 4.942.893.462, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X1.1 adalah + Rp 4.942.893.462, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X1.1 adalah – Rp 4.942.893.462.
6. Variabel Penyaluran ZIS (X1.2) memiliki nilai mean atau rata-rata Rp 5.252.956.667 dengan nilai maksimum Rp 20.636.104.993 dan nilai minimum Rp 984.918.944. Dengan standar deviasi Rp 97.781.500, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X1.1 adalah + Rp 4.372.137.744, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X1.1 adalah – Rp 4.372.137.744.
7. Variabel Angka Partisipasi Kasar (X2.1) memiliki nilai mean atau rata-rata 78,484% dengan nilai maksimum 135,09% dan nilai minimum 53,04%. Dengan standar deviasi 13,832%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X2.1 adalah + 13,832%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X2.1 adalah – 13,832%.
8. Variabel Angka Partisipasi Murni (X2.2) memiliki nilai mean atau rata-rata 57,12% dengan nilai maksimum 84,26% dan nilai minimum 36,67%. Dengan standar deviasi 9,51%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X2.2 adalah + 9,51%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X2.2 adalah – 9,51%.

9. Variabel Jumlah Puskesmas (X3.1) memiliki nilai mean atau rata-rata 14,891 puskesmas dengan nilai maksimum 44 puskesmas dan nilai minimum 5 puskesmas. Dengan standar deviasi 7,682, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X3.1 adalah + 7,682, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X3.1 adalah - 7,682.
10. Variabel Tenaga Kesehatan (X3.2) memiliki nilai mean atau rata-rata 49,98 orang dengan nilai maksimum 475 orang dan nilai minimum 3 orang. Dengan standar deviasi 49,177, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X3.2 adalah + 49,177, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X3.2 adalah - 49,177.
11. Variabel Angka Harapan Hidup (X4.1) memiliki nilai mean atau rata-rata 67,548 tahun dengan nilai maksimum 71,27 tahun dan nilai minimum 62,83 tahun. Dengan standar deviasi 2,285 tahun, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X4.1 adalah + 2,285 tahun, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X4.1 adalah - 2,285 tahun.
12. Variabel Angka Melek Huruf (X4.2) memiliki nilai mean atau rata-rata 97,242% dengan nilai maksimum 100% dan nilai minimum 87,89%. Dengan standar deviasi 2,324%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X4.2 adalah + 2,324%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X4.2 adalah - 2,324%.
13. Variabel Angka Harapan Lama Sekolah (X4.3) memiliki nilai mean atau rata-rata 13,687% dengan nilai maksimum 17,26% dan nilai minimum 1,76%. Dengan

standar deviasi 1,502%, yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X4.3 adalah + 1,502%, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X4.3 adalah – 1,502%.

14. Variabel Pengeluaran (X4.4) memiliki nilai mean atau rata-rata Rp 8.441,647 ribu dengan nilai maksimum Rp 25.917 ribu dan nilai minimum Rp 10.043 ribu. Dengan standar deviasi Rp 2.258,932 ribu yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel X2.1 adalah + Rp 2.258,932 ribu, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel X2.1 adalah – Rp 2.258,932 ribu.

4.3 Analisis Data Kuantitatif

4.3.1 Menilai Outer Model

1. Menilai Outer Model

Analisa *Outer model* menspesifikasikan bagaimana setiap blok indikator-indikatonya berhubungan dengan variabel latennya. *Outer model* menggunakan 2 jenis pengujian yaitu; Uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas pun terbagi menjadi dua pengujian yaitu uji validitas pada indikator reflektif dan uji validitas pada indikator formatif.

A. Uji Validitas

Indikator Reflektif

Konstruk dengan indikator reflektif mengasumsikan bahwa kovarian di antara pengukuran model dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi domain konstruksinya. Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke indikator. Uji validitas

indikator reflektif menggunakan 3 pengujian yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Hasil pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Pengujian validitas konvergen (*convergent validity*) berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.2.8 dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk setiap indikator konstruk. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai validitas konvergen yaitu nilai *loading factor* harus ≥ 0.50 .

4.1 Tabel 4.2 Outer Loading

OUTER LOADING						
	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2
X1.1	0.960					
X1.2	0.958					
X2.1		0.944				
X2.2		0.894				
X3.1			0.805			
X3.2			0.843			
X4.1				0.796		
X4.2				0.731		
X4.3				0.660		
X4.4				0.750		
Y1					1,000	
Y2.1						0.923
Y2.2						0.950
Y2.3						0.879

Outer Loading digunakan untuk mengukur validitas kovergen dari model pengukuran (instrumen). Dari hasil pengolahan data dengan PLS yang terlihat pada

tabe diatas dapat dilihat bahwa mayoritas indikator masing-masing nilai loading telah memenuhi *convergent validity* karena semua *factor loading* > 0.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *convergen validity* dari kelompok konstruk endogen X1 (ZIS), X2 (Pendidikan), X3 (Kesehatan), X4 (IPM), dan Y2 (Kemiskinan) adalah **Valid**.

b. Discriminant Validty

Model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan *item* pengukuran lebih besar dari pengukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Tabel 4.3 Nilai Cross Loading

CROSS LOADING						
	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2
X1.1	0.960	-0.348	0.462	0.569	0.626	-0.203
X1.2	0.958	-0.298	0.465	0.574	0.624	-0.186
X2.1	-0.336	0.944	-0.462	-0.220	-0.407	0.062
X2.2	-0.278	0.894	-0.354	-0.140	-0.278	-0.017
X3.1	0.354	-0.484	0.805	-0.069	0.575	0.006
X3.2	0.439	-0.271	0.843	0.448	0.542	-0.247
X4.1	0.450	-0.342	0.189	0.796	0.484	-0.326
X4.2	0.454	-0.249	0.196	0.731	0.288	-0.427
X4.3	0.432	0.034	0.127	0.660	0.315	-0.296
X4.4	0.416	0.005	0.207	0.750	0.301	-0.385
Y1	0.652	-0.381	0.676	0.476	1,000	-0.284
Y2.1	-0.310	0.027	-0.183	-0.597	-0.323	0.923
Y2.2	-0.112	0.050	-0.121	-0.365	-0.222	0.950
Y2.3	-0.037	0.003	-0.085	-0.260	-0.191	0.879

Dari hasil estimasi *cross loading* diatas, menunjukkan bahwa setiap indikator pada konstruk memiliki nilai faktor loading yang lebih besar

dibandingkan dengan dengan nilai konstruk lainnya. Sebagai contoh, indikator X1.1 memiliki nilai loading 0.960 dan X1.2 dengan nilai loading 0.958. Indikator ini memiliki korelasi yang lebih tinggi di bandingkan dengan konstruk X2 (-0.348), X3 (0.462), X4 (0.569), Y1 (0.626), dan Y2 (-0.203). Begitu pula dengan konstruk X1.2 memiliki korelasi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan konstruk lainnya. Selanjutnya, tabel diatas terlihat bahwa setiap indikator pada X2, X3, X4, Y1, dan Y2 memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator telah tepat untuk menjelaskan masing-masing konstruk variabel latennya dan membuktikan bahwa berdasarkan *discriminant validty* semua indikator adalah **Valid**.

c. Reliabilitas Konstruk

Tahapan selanjutnya adalah pengujian konsistensi pengukuran (reliabilitas) dengan *Average Variance Extract (AVE)* dan *Composite Reliability (CR)*. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Wijayanto, 2008). Reliabilitas dapat diketahui melalui nilai *Composite Reliability (CR)* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. *Composite Reliability* dikatakan baik apabila memiliki nilai ≥ 0.70 . Nilai AVE dikatan baik apabila memiliki nilai ≥ 0.50 (Ghozali, 2014). Dari hasil pengujian AVE dan CR ditunjukin pada tabel dibawah beriku ini:

Tabel 4.4 Nilai Reliabilitas Konstruk Eksogen terhadap Konstruk Endogen

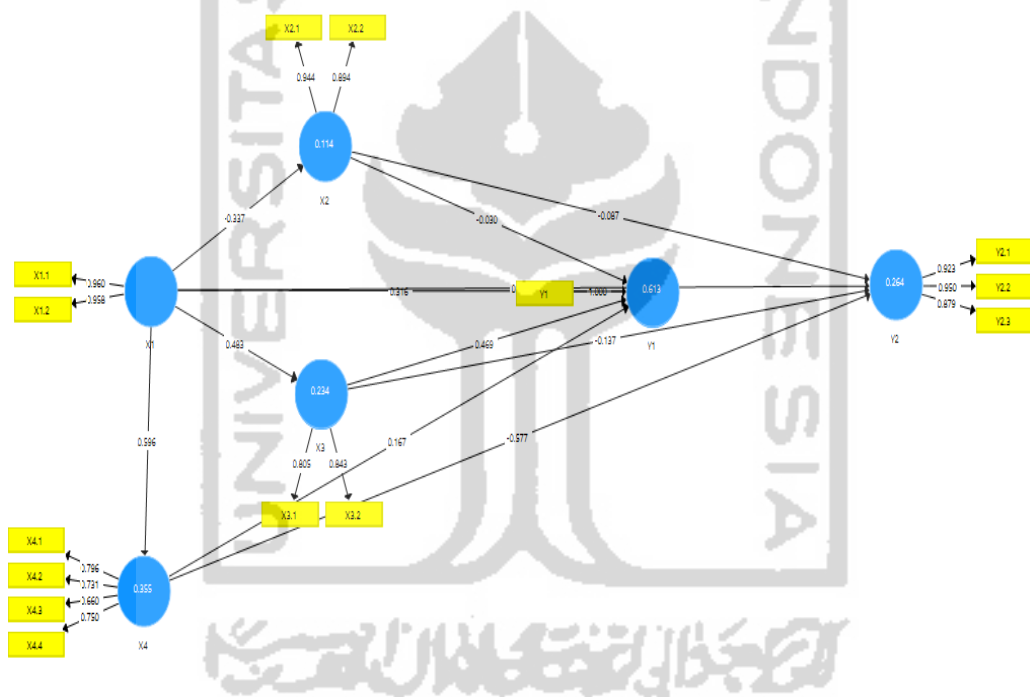
Konstruk Eksogen	Composite Reliability	Average Variance Extract (AVE)	Kesimpulan
X1 (ZIS)	0.958	0.919	Reliabilitas Baik
X2 (Pendidikan)	0.916	0.845	Reliabilitas Baik
X3 (Kesehatan)	0.809	0.679	Reliabilitas Baik
X4 (IPM)	0.825	0.541	Reliabilitas Baik
Y1 (Pertumbuhan Ekonomi)	1.000	1.000	Reliabilitas Baik
Y2 (Kemiskinan)	0.941	0.842	Reliabilitas Baik

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dari konstruk pengukuran dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diamati adalah **Valid** dalam mengukur variabel latennya, dan reliabilitas model pengukurannya pun baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator adalah **Reliable** dalam menyusun konstruk variabel latennya.

d. Signifikansi Outer Model

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka didapatkan hasil bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid dan reliable. Tahap pengujian selanjutnya adalah signifikansi outer model pada konstruk eksogen dan konstruk endogen.

Signifikansi outer model dapat diketahui setelah melakukan *bootstrapping*. Hasil setelah dilakukan *bootstrapping* dapat dilihat pada gambar (di bawah ini). Signifikan indikator penyusun variabel eksogen dan endogen laten dapat dilihat dari nilai t statistic atau p-value. Apabila t-statistik > t-table, dan apabila p-value < $\alpha = 0.05$, maka semua indikator signifikan mengukur konstruk eksogen dan endogen laten. Nilai t statistic dan p-value masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 4.1 Diagram Path pada Model Penelitian

Tabel 4.5 Signifikansi Outer Model

	Original Sample	T Statistics	P Values	Uji Signifikansi
X1.1 <- X1	0.960	84,626	0.000	Signifikan

X1.2 <- X1	0.958	106,431	0.000	Signifikan
X2.1 <- X2	0.944	99,545	0.000	Signifikan
X2.2 <- X2	0.894	17,665	0.000	Signifikan
X3.1 <- X3	0.805	11,452	0.000	Signifikan
X3.2 <- X3	0.843	28,261	0.000	Signifikan
X4.1 <- X4	0.796	27,348	0.000	Signifikan
X4.2 <- X4	0.731	18,420	0.000	Signifikan
X4.3 <- X4	0.660	7,121	0.000	Signifikan
X4.4 <- X4	0.750	14,586	0.000	Signifikan
Y2.1 <- Y2	0.923	88,583	0.000	Signifikan
Y2.2 <- Y2	0.950	58,699	0.000	Signifikan
Y2.3 <- Y2	0.879	43,427	0.000	Signifikan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai p-value kurang dari $\alpha = 0.05$, yang artinya semua indikator penyusun variabel eksogen dan endogen laten dapat dikatakan signifikan dalam mengukur setiap konstruk variabel eksogen maupun endogen laten.

4.3.2 Menilai Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah dilakukan pengujian outer model, maka selanjutnya dilakukan evaluasi model structural (*inner model*) untuk melihat kecocokan antar konstruk dalam model structural dan kemampuan prediktif model. Model struktural dievaluasi

dengan menggunakan nilai R^2 untuk konstruk endogen, relevansi prediktif (Q^2), indeks kualitas, serta nilai koefisien path atau t-values dan p-values setiap path untuk menguji signifikansi antar konstruk dalam model structural.

Hubungan dalam inner model yang akan diamati dalam penelitian ini ada dua jenis. *Pertama* adalah hubungan antar konstruk endogen dan *Kedua* adalah hubungan antar konstruk eksogen dengan konstruk endogen.

a. Hubungan Antar Konstruk Endogen

Evaluasi model struktural jenis kedua adalah hubungan antar konstruk endogen dengan mengamati nilai R^2 yang dihasilkan melalui pengolahan data. Nilai R^2 mencerminkan sejauh mana suatu konstruk eksogen dapat menjelaskan konstruk eksogen lainnya. Nilai R^2 dianggap lemah, moderat, dan kuat jika menunjukkan secara berurutan sekitar 0.19, 0.33, 0.67 (Ghozali, 2014). Nilai R^2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Nilai R^2 Variabel Laten Endogen

Variabel	R Square
Y1	0.605
Y2	0.247

Nilai R^2 pada variabel endogen Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) adalah 0.668 > 0.33. Artinya variabel zakat, pendidikan, kesehatan, dan IPM dapat memprediksikan atau menjelaskan variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 60.5 % sedangkan sisanya 39.5 % di prediksi atau variabel lain yang tidak teliti.

Hubungan antara variabel zakat, pendidikan, kesehatan, dan IPM dengan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan dengan kategori kuat.

Nilai R^2 pada variabel endogen Y2 (Kemiskinan) adalah $24.7 > 0.19$. Artinya variabel zakat, pendidikan, kesehatan, dan IPM dapat memprediksikan atau menjelaskan variabel Kemiskinan sebesar 24.7 % sedangkan sisanya 75.3 % di prediksi atau variabel lain yang tidak teliti. Hubungan antara variabel zakat, pendidikan, kesehatan, dan IPM dengan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan dengan kategori moderat.

b. Relevansi Prediktif (Q^2)

Di samping nilai R^2 , pada model PLS juga dievaluasi dengan melihat ukuran relevansi prediksi (Q^2) dari variabel laten endogen dengan indikator reflektif yang dilakukan melalui prosedur *blindfolding*. Menurut Chin dalam Ghozali (2014:26) dikatakan bahwa nilai Q^2 lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai Q^2 kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

Nilai Q^2 pengujian model struktur dilakukan dengan melihat nilai Q^2 (*predictive relevance*). Untuk menghitung Q^2 dapat digunakan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,605) (1 - 0,247)$$

$$Q^2 = 1 - (0.2496)$$

$$Q^2 = 0.7025$$

Berdasarkan hasil perhitungan Q^2 menunjukkan bahwa nilai Q^2 0.7025. menurut Ghazali (2014), nilai Q^2 dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai relevansi prediktif sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki relevansi prediktif. Dalam model penelitian ini, konstruk atau variabel laten endogen memiliki nilai Q^2 lebih besar dari 0 sehingga prediksi yang dilakukan oleh model dapat dikatakan telah **Relevan.**

c. Indeks Kualitas

Menurut Ghazali dan Latan (2015), setiap bagian dari mode membutuhkan validasi model pengukuran, model struktural, dan keseluruhan model yang dapat diukur dengan nilai *Goodness of fit (GoF) index*. Nilai GoF dalam Smart PLS sebesar lebih dari sama dengan (\geq) 0.1 lebih dari sama dengan (\geq) 0.25 lebih dari sama dengan (\geq) 0.36, menunjukkan bahwa nilai kualitas keseluruhan model kecil, menengah, dan besar. Dalam penelitian ini, nilai GoF yang dihasilkan dari output Smart PLS sebesar 0.31 sehingga dengan demikian secara keseluruhan model dalam penelitian ini dianggap fit karena nilai GoF > 0.25 atau secara keseluruhan model memiliki nilai kualitas yang menengah.

Tabel 4.7 Goodness of Fit (Gof)

Variabel	R Square	Average Variance Extract
X2	0.114	0.109
X3	0.234	0.229
X4	0.355	0.351
Y1	0.613	0.605
Y2	0.264	0.247
Rata-Rata	0.316	0.3082

$$GOF = \sqrt{\text{Average R}^2 * \text{Average Commuality}}$$

Keterangan:

Average R² = Rata-rata R-Squared, Average Commuality = Rata-Rata AVE

Sehingga:

$$GOF = \sqrt{0.316 * 0.3082}$$

$$GOF = \sqrt{0.10548348}$$

$$GOF = 0.31$$

d. Hubungan Konstruk Eksogen dengan Konstruk Endogen

Evaluasi model structural adalah hubungan antara konstruk eksogen dengan konstruk endogen yang dapat dilihat melalui uji t statistik atau p-value dan koefisin jalur struktural. Apabila niai t-statistik > t-tabel dan apabila nilai p-value < $\alpha = 0.05$ maka artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara

konstruk eksogen dan konstruk endogen. Hasil pengolahan data yang dapat menjelaskan hubungan antara konstruk eksogen dengan konstruk endogen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Path Coefficient

	Original Sample	T Statistics	P Values
X1 -> X2	-0.337	5,252	0.000
X1 -> X3	0.483	7,407	0.000
X1 -> X4	0.596	11,976	0.000
X1 -> Y1	0.316	4,343	0.000
X1 -> Y2	0.178	2,063	0.040

Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.2.8

Hasil perhitungan dengan Smart PLS 3.2.8 diketahui hasil probabilitas sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap X2 (Pendidikan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan X2 (Pendidikan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X2$ (-0.337) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian

Hipotesis 1 ditolak.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap X3 (Kesehatan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur

antara X1 (ZIS) dan X3 (Kesehatan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X3$ (0.483) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 2 diterima**.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap X4 (IPM). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan X4 (IPM) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X4$ (0.596) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 3 diterima**.

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 (Pertumbuhan Ekonomi). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow Y1$ (0.316) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 4 diterima**.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis 5 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y2 (Kemiskinan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan Y2 (Kemiskinan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow Y2$ (0.178) dan nilai probabilitas $0.008 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 5 ditolak**.

Tabel 4.9 Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Original Sample	T Statistics	P Values
X1 -> Y1	0.336	7,992	0.000
X1 -> Y2	-0.381	5,632	0.000

Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.2.8

Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3.2.8 sebagaimana pada tabel 4.1 di atas didapatkan:

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 (Pertumbuhan Ekonomi). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow Y1$ (0.336) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 4 diterima**.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis 5 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 (Kemiskinan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) dan Y2 (Kemiskinan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow Y2$ (-0.381) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 5 diterima**.

Tabel 4.10 Pengaruh Spesifik Tidak Langsung

Variabel	Original Sample	T Statistics	P Values
X1 -> X2 -> Y1	0.010	0.609	0.543
X1 -> X3 -> Y1	0.227	5,473	0.000
X1 -> X4 -> Y1	0.100	2,455	0.014
X1 -> X2 -> Y2	0.029	1,228	0.220
X1 -> X3 -> Y2	-0.066	1,629	0.104
X1 -> X4 -> Y2	-0.344	6,203	0.000

Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.2.8

Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3.2.8 sebagaimana pada tabel 4.1 di atas didapatkan:

Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis 6 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 (Perumbuhan Ekonomi) melalui variabel X2 (Pendidikan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) melalui X2 (Pendidikan), terhadap Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X2 \rightarrow Y1$ (0.010) dan nilai probabilitas $0.543 > \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 6 ditolak**.

Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis 7 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 (Perumbuhan Ekonomi) melalui variabel X3 (Kesehatan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS) melalui X3

(Kesehatan), terhadap Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X3 \rightarrow Y1$ (0.227) dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 7 diterima.**

Pengujian Hipotesis 8

Hipotesis 8 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 (Perumbuhan Ekonomi) melalui variabel X4 (IPM). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS), X4 (IPM), terhadap Y1 (Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X4 \rightarrow Y1$ (0.100) dan nilai probabilitas $0.014 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 8 diterima.**

Pengujian Hipotesis 9

Hipotesis 6 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X2 (Pendidikan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS), X2 (Pendidikan), terhadap Y2 (Kemiskinan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X2 \rightarrow Y2$ (0.029) dan nilai probabilitas $0.104 > \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 9 ditolak.**

Pengujian Hipotesis 10

Hipotesis 10 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X3 (Kesehatan). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS), X3 (Kesehatan), terhadap Y2 (Kemiskinan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X3 \rightarrow Y2$ (-0.006) dan

nilai probabilitas $0.220 > \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 10 ditolak.**

Pengujian Hipotesis 11

Hipotesis 11 menyatakan bahwa variabel X1 (ZIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 (Kemiskinan) melalui variabel X4 (IPM). Hasil uji terhadap koefisien dan signifikansi jalur antara X1 (ZIS), X4 (IPM), terhadap Y2 (Kemiskinan) menunjukkan nilai koefisien jalur $X1 \rightarrow X4 \rightarrow Y2 (-0.344)$ dan nilai probabilitas $0.000 < \alpha = 0.05$ yang berarti signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 11 diterima.**

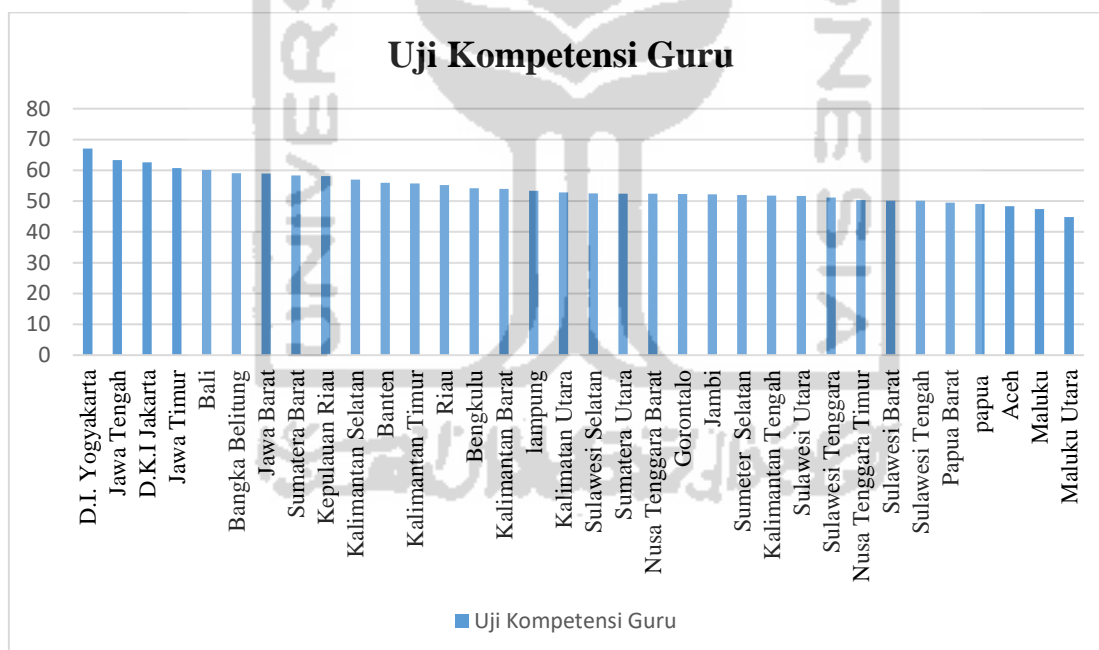
4.4 Analisis Interpretasi Hasil

4.4.1 Pengaruh ZIS terhadap Pendidikan

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendidikan di Provinsi Aceh. Bidang pendidikan merupakan salah satu program unggulan dari Baitul Mal Aceh. Program pendidikan ini terdiri dari Beasiswa Penuh, Bantuan Pendidikan Berkelanjutan, dan Bantuan Sekali Waktu. Ketiga program tersebut menasar pada tingkatan pendidikan SD hingga D3 dengan memberikan bantuan penuh (beasiswa penuh), bantuan dalam melaksanakan pendidikan wajib (Bantuan Pendidikan Berkelanjutan), dan bantuan bagi Mahasiswa putra/putri daerah Aceh yang sedang melakukan tugas akhir (Bantuan Sekali Waktu).

Hasil analisis menunjukkan nilai original sample/ koefisien (-0,337) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000). Di mana dugaannya terdapat pengaruh langsung, positif dan signifikan ZIS terhadap pendidikan, namun

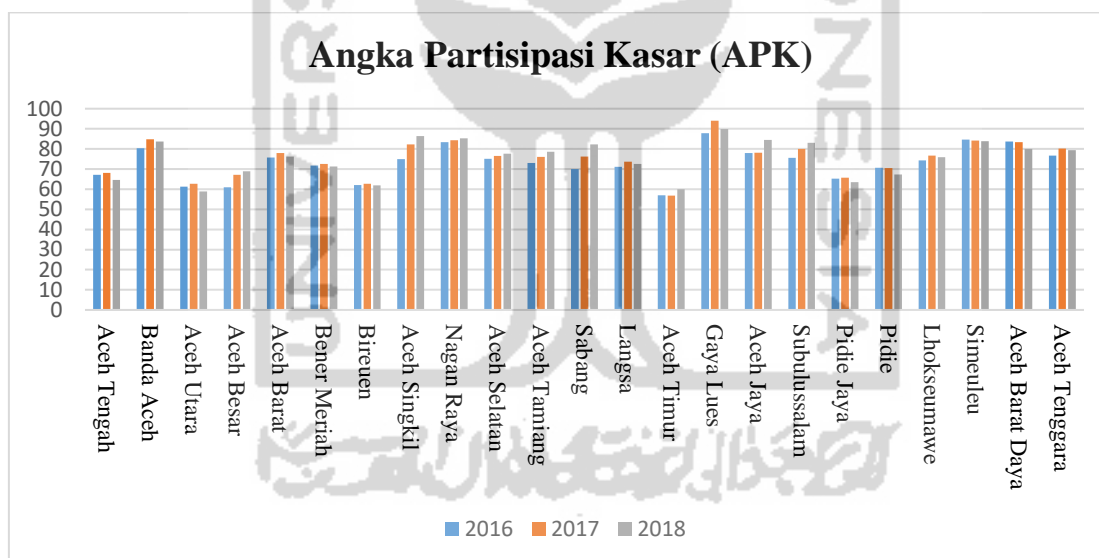
hasil menunjukkan adanya pengaruh langsung negatif dan signifikan ZIS terhadap pendidikan atau distribusi ZIS yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam program pendidikan menurunkan pendidikan di Provinsi Aceh. Hasil ini sesuai dengan kondisi pendidikan di provinsi Aceh dapat dikatakan belum baik, karena anggaran pemerintah Provinsi Aceh untuk pendidikan terbilang besar pun tidak dapat meningkatkan pendidikan di Provinsi Aceh, karena kenyataannya pendidikan di Provinsi cenderung terus menurun setiap tahunnya. Ini terjadi karena dua alasan, *pertama* mutu guru yang rendah dan *kedua* Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagian besar kabupaten/kota Provinsi Aceh yang rendah dan bahkan terus menurun pada beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.



Gambar 4.2 Uji Kompetensi Guru Tahun 2015

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Gambar 4.1 menunjukkan uji kompetensi guru yang menggambarkan bagaimana kualitas atau mutu guru yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Terlihat mutu guru terbaik di tempati oleh Yogyakarta dengan nilai 67,02 dan mutu guru terendah di tempati oleh Maluku utara dengan nilai 44,79. Provinsi aceh menempati peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas atau mutu guru dengan nilai 48,33. Nilai ini bahkan lebih rendah di dibandingkan dengan kualitas atau mutu guru yang ada di Papua Barat (49,47) dan Papua (49,09). Ini menggambarkan bagaimana guru sebagai komponen penting dalam meningkatkan pendidikan belum mampu hadir dalam upaya meningkatkan pendidikan di Provinsi Aceh.

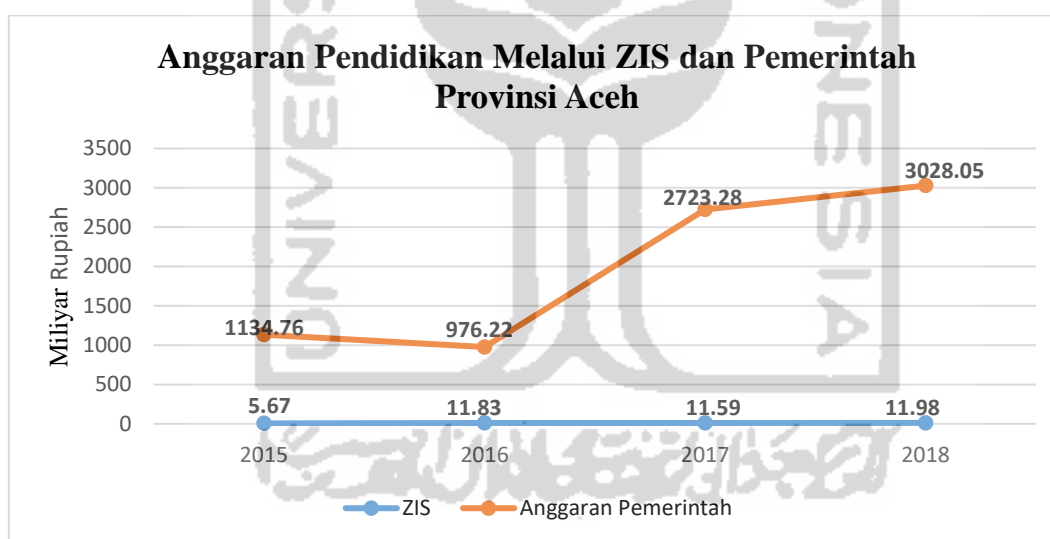


Gambar 4.3 Angka Partisipasi Kasar Kab/Kota Aceh (2016-2018)

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Selanjutnya adalah APK sebagai gambaran untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Terlihat dalam gambar 4.2 bahwa

13 dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh memiliki nilai APM yang cenderung mengalami penurunan yaitu Aceh Tengah, Aceh Utara, Banda Aceh, Aceh Barat, Bener Meriah, Biruen, Langsa, Pidie Jaya, Pidie, Lhoksemawe, Simeuleu, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tenggara. Tidak hanya mengalami penurunan saja, beberapa kabupatennya pun memiliki nilai APM yang jauh daripada nilai APM secara nasional. Ini menunjukkan ‘partisipasi masyarakat’ dalam pendidikan di Provinsi Aceh masih cenderung semakin ‘menurun’ setiap tahunnya. Sehingga tidak hanya mutu guru yang rendah namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, menjadikan kualitas pendidikan Provinsi semakin menurun dan tertinggal dibandingkan dengan Provinsi lainnya.



Gambar 4.4 Anggaran Pendidikan melalui ZIS dan Pemerintah Provinsi Aceh (2015-2018)

Sumber: Baitul Mal Aceh & Neraca Pendidikan Daerah

Selanjutnya adalah perbandingan antara anggaran pendidikan yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dengan pemerintah provinsi. Terlihat bahwa perbedaan yang signifikan

diantara keduanya. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa penyaluran dana pendidikan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh belum memiliki kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pendidikan di Provinsi Aceh, apabila dibandingkan dengan anggaran pemerintah provinsi Aceh. Namun demikian, keduanya baik Baitul Mal Aceh maupun pemerintah Provinsi Aceh belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi melalui peyaluran dana untuk pendidikan, yang diakibatkan oleh mutu guru dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang rendah atau cenderung menurun setiap tahunnya.

4.4.2 Pengaruh ZIS terhadap Kesehatan

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesehatan di Provisni Aceh. Kesehatan merupakan bagian dari program sosial yang ada di Baitul Mal Aceh. Terdapat tiga program bantuan kesehatan dalam program sosial, yaitu Santunan Fakir Uzur Seumur Hidup, Bantuan Alat Kesehatan, dan Bantuan Dana bagi Penderita Kanker dan Thalesmia. Bantuan Fakir Uzur ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki harta dan penghasilan, usia yang relatif tua dan dalam keadaan sakit. Bantuan yang diberikan berupa santunan bulanan sebesar Rp 300.000, Program bantuan alat kesehatan berupa kursi roda, alat bantu berjalan dan alat bantu dengar, dan Program Bantuan Dana bagi Penderita Kanker dan Thalesmia yang ditujukan kepada penderita dari keluarga miskin melalui dukungan biaya dalam menjalani pemeriksaan rutin ke rumah sakit, sekaligus biaya akomodiasi selama pemeriksaan sehingga harapannya dapat membantu masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang baik.

Hasil analisis menunjukkan nilai original sample/ koefisien (0,483) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000). Ini menunjukkan bahwa distribusi ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh memiliki pengaruh langsung dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil ini juga selaras dengan sub program sosial dalam bantuan dana kesehatan yang tunjukkan pada seseorang yang dikategorikan membutuhkan bantuan kesehatan baik itu melalui sarana dan prasana kesehatan yang memadai, dan Baitul Mal Aceh memenuhi itu semua. Sehingga tujuan untuk membuat semua mustahik yang memiliki masalah kesehatan dapat terbantu melalui program bantuan kesehatan ini dan harapannya dengan ini mampu memperoleh kehidupan yang baik serta dapat membuat masyarakat di Provinsi Aceh dapat mencapai kesejahteraannya khususnya bagi mustahik.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko dkk., (2017), mengenai dampak zakat pada pembangunan manusia di 5 wilayah di Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyak dana zakat yang terkumpul, maka semakin kuat bagi zakat untuk memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi dalam upayanya menggantikan peran anggaran pemerintah dalam mencapainya. Terdapat program-program yang diselenggarakan seperti program memenuhi kebutuhan dasar, program berkelanjutan baik fisik maupun psikologis serta kebutuhan spiritual. Serta salah satunya adalah kesehatan dan asuransi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

4.4.3 Pengaruh ZIS terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Apabila kita uraikan komponen IPM, terdapat komponen-komponen yang secara garis besar adalah Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Pendidikan dalam Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Baitul Mal Aceh mendukung pencapaian dalam komponen ini dengan adanya bantuan pendidikan berupa beasiswa sehingga tujuannya agar setiap mustahik mampu memperoleh pendidikan yang baik bahkan didukung hingga pada tingkat pendidikan D3. Kesehatan dalam Angka Harapan Hidup (AHH), Baitul Mal Aceh melalui program sosial nya mendukung kehidupan bagi mustahik yang lemah secara ekonomi, sakit, dan tidak memiliki keluarga, memberikan bantuan alat kesehatan untuk menopang kehidupan mustahik agar lebih baik, dan memberikan bantuan bagi penderita kanker dan thalesmia untuk dapat memperoleh sarana dan prasarana kesehatan hingga sembuh. Dan Ekonomi dalam pengeluaran dengan mengarahkan mustahik untuk tidak sepenuhnya konsumtif sehingga mampu mandiri secara ekonomi dan mengubah mustahik menjadi muzaki.

Hasil analisis menunjukkan nilai original sample/ koefisien (0,596) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000). Ini menunjukkan bahwa distribusi ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh memiliki pengaruh secara langsung dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Pemaparan program-program diatas menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh melalui program Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, yang mendukung kualitas masyarakat Provinsi Aceh semakin membaik. Sehingga hasil yang ditemukan tersebut sesuai dengan tujuan program-program dari Baitul Mal Aceh yang berhubungan dengan peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Aceh.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Rédha dkk., (2016), yang meneliti mengenai dampak pembiayaan dana zakat dalam mengurangi kemiskinan di Aljazair. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan melalui dana zakat terhadap proyek-proyek yang dilakukan memiliki pengaruh positif dan signifikan peningkatan IPM. Sehingga ketika terjadi peningkatan proyek baru yang dilakukan melalui dana zakat maka akan meningkatkan IPM, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kontribusi dalam peningkatan PDB per kapita.

4.4.4 Pengaruh ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Baitul Mal Aceh mendukung kemandirian ekonomi bagi setiap mustahik dan harapannya dapat berdampak bagi perekonomian di Provinsi Aceh. Program dalam pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan Baitul Mal Aceh berupa pelatihan skill bagi putra/putri daerah, pemberian modal usaha, hingga memberikan bantuan alat-alat kerja bagi pelaku usaha yang sudah memulai usahanya.

Hasil analisis pengaruh ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh menunjukkan nilai original sample/ koefisien (0,316) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000) pada pengaruh langsung dan nilai original sample/ koefisien (0,336) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000) pada pengaruh spesifik tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik khususnya, didukung oleh program pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Aceh. Program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh, yang kemudian diterapkan juga pada tingkat kab/kota kecamatan hingga gampong (kelurahan), program yang menasar pada seseorang yang belum memiliki keahlian tertentu untuk dapat memperoleh akses pelatihan agar memiliki keahlian (*skill*) sebagai nilai tambah, memberikan modal usaha bagi para mustahik untuk memulai usahanya sehingga seperti tujuan awal dari Baitul Mal Aceh ingin menjadikan mustahik mandiri secara ekonomi dan ingin menjadikan mustahik menjadi muzaki. Kemudian memberikan bantuan alat-alat kerja bagi masyarakat Aceh yang memiliki usaha, untuk mendapatkan keringan atas pengadaan alat-alat melalui program tersebut sehingga mampu lebih produktif. Penyaluran ZIS melalui program pemberdayaan ekonomi ini, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya tidak sebesar sektor-sektor lainnya yang terdapat dalam komponen PDRB Provinsi Aceh.

ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendidikan, Kesehatan, dan IPM. Hasil analisis pengaruh ZIS melalui Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh menunjukkan nilai original sample/ koefisien (0,010) dan tidak signifikan pada nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5% (0,543). Ini menunjukkan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program pendidikan yang dilakukan. Hasil ini juga sesuai dengan kondisi pendidikan di Provinsi Aceh yang belum baik sehingga berpengaruh pada kualitas lulusan (rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan) yang juga menggambarkan kualitas dari

masyarakat, dan ketika dihubungkan dengan produktivitas tentunya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berbeda dengan hasil analisis pengaruh ZIS melalui Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan nilai nilai original sample/ koefisien (0,227) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000). Program kesehatan yang di laksanakan oleh Baitul Mal Aceh yang menysasar “semua” mustahik yang dalam keadaan sakit bahkan pada mustahik yang memiliki penyakit serius seperti kanker, dan memberikan bantuan alat kesehatan bagi yang membutuhkan. Sehingga sasaran program bantuan kesehatan pada mustahik ini, membuat mustahik mampu mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang baik. Dan harapannya dapat menjadikan mustahik memiliki kondisi kesehatan yang baik juga, dan mustahik yang membutuhkan alat kesehatan dapat mendukung aktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas mustahik yang dapat mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Temuan lain juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui IPM. Di mana nilai nilai original sample/ koefisien (0,100) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,014). Ini menunjukkan bahwa program-program yang diciptakan oleh Baitul Mal Aceh seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi mustahik dapat meningkatkan kualitas masyarakat, sehingga dapat berdampak pada produktivitas masyarakat yang kemudian memiliki dampak berganda pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Baitul Mal Aceh dapat dikatakan memiliki fokus utama pada kemajuan bagi mustahik dari segala aspek. Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, dengan

tujuan menjadikan mustahik memiliki nilai lebih dan dapat menjadikan mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Setiap program seperti bantuan pendidikan berupa beasiswa, bantuan dana kesehatan dan alat kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan untuk meningkatkan skill, pemberian modal usaha agar mustahik dapat memulai usaha agar menjadi mandiri secara ekonomi, dan memberikan bantuan alat-alat kerja bagi mustahik yang sudah memiliki kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya. Sehingga melalui aspek-aspek ini mampu meningkatkan kualitas mustahik yang berdampak pada meningkatkannya produktivitas bagi mustahik untuk menciptakan sesuatu yang bernilai dan harapannya mampu memberikan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Athoillah (2018), dan Mohammed dkk., (2019), yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua penelitian ini dilakukan di dua Negara yang berbeda. Athoillah (2018), melakukan penelitian di Indonesia dengan fokus pulau Jawa, di mana hasil menunjukkan adanya zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Mohammed (2019), melakukan penelitian di Malaysia, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara zakat, PDB, dan kemiskinan. Di mana terdapat hubungan penting antara zakat dengan peningkatan PDB.

4.4.5 Pengaruh ZIS terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

ZIS berparuh langsung negative dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Tujuan utama Baitul Mal Aceh melalui program-program unggulannya memiliki

tujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi, sehingga mampu mengeluarkan mustahik dari lingkaran kemiskinan dan dapat berubah menjadi muzaki. Hasil analisis menunjukkan nilai nilai original sample/ koefisien (0,178) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,040). Di mana dugaannya terdapat pengaruh langsung, negatif, dan signifikan, namun hasil menunjukkan sebaliknya yaitu positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa distribusi ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui program pembedayaan ekonomi masyarakat secara langsung memiliki pengaruh yang positif dapat meningkatkan angka kemiskinan di Provinsi.

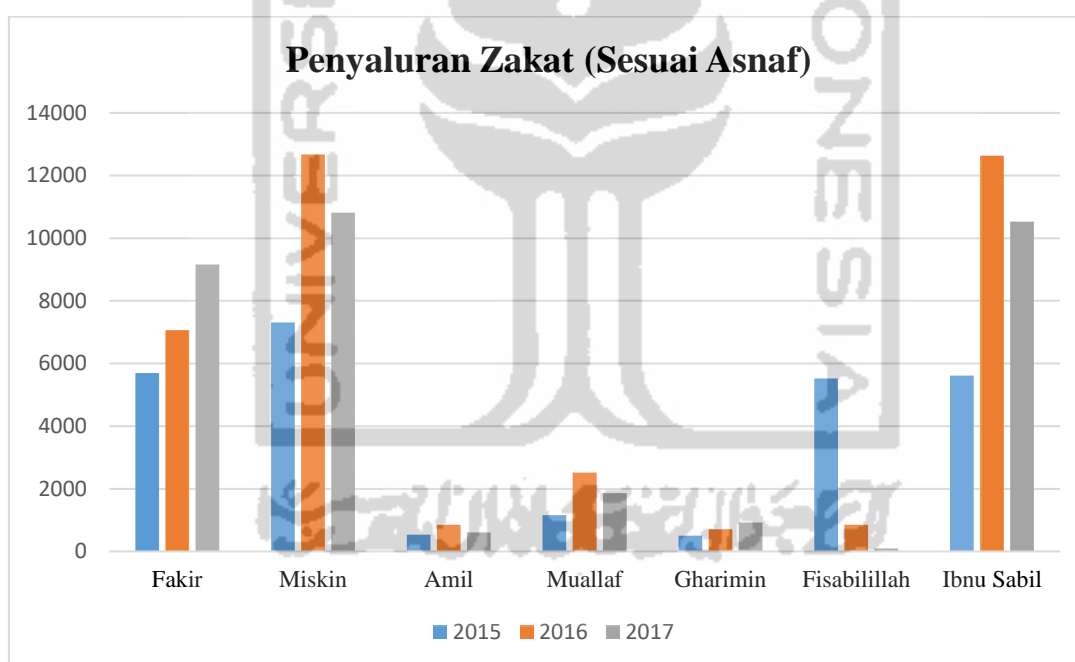
Tabel 4.11 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2014-2018

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2014	18,05
2015	17,08
2016	16,73
2017	16,89
2018	18,49

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data pada tabel 4.11 menunjukkan presentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada 5 tahun terakhir yang mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Peningkatan yang pesat di mulai pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Sehingga penyaluran ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi mustahik belum sepenuhnya dapat menurunkan angka presentase kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh, namun justru sebaliknya karena presentase penduduk miskin di Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan

Pujiyono (2008) dalam model yang di kembangkannya dalam meneliti efektifitas ZIS dalam mengatasi kemiskinan dan efisiensi ZIS dalam meningkatkan pendapatan nasional, yang menjelaskan dampak zakat terhadap kemiskinan melalui *perfect targeting* (ketepatan sasaran). Modelnya menunjukkan bahwa dana zakat yang tersedia ‘belum bisa’ menurunkan garis kemiskinan dan penduduk miskin secara langsung. Karena penggunaan dana zakat oleh mustahik lebih bersifat konsumtif, sehingga hanya berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat saja. Oleh karena itu pengaruhnya lebih berdampak pada meningkatkannya pendapatan nasional namun tidak menurunkan kemiskinan, bahkan memiliki potensi meningkatnya kemiskinan.



Gambar 4.5 Realisasi Penyaluran ZIS Sesuai Asnaf (2015-2017)

Selain itu temuan lain di temukan dalam data realisasi penyaluran dana ZIS sesuai dengan asnafnya yang dilakukan oleh Baitul Maal Aceh. Terlihat bahwa penyaluran ZIS untuk asnaf masyarakat miskin mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Data

diatas juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk ibnu sabil atau seseorang yang sedang dalam perjalanan cukup tinggi bahkan lebih besar di bandingkan dengan penyaluran bagi asnaf fakir. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyaluran ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh bagi asnaf fakir dan asnaf miskin belum mendapatkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih bagi Baitul Mal Aceh (melalui program-programnya) untuk dapat memberikan pengaruh langsung atau berdampak besar terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian lebih lanjut pun di lakukan oleh Pratama dan Rahadiana (2020), dalam menganalisis peran potensi muzzaki dalam mengurangi kemiskinan di Aceh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penerima utama zakat pada tahun 2017 adalah ibnu sabil yang menerima sekitar 31,52% dari jumlah total, diikuti oleh orang-orang miskin dan membutuhkan, masing-masing sebesar 31,28 dan 26,84. Namun total zakat yang diterima oleh orang miskin dan membutuhkan adalah 58,12% yang mana lebih dari setengahnya. Sehingga penting bagi Baitul Mal Aceh untuk memberikan fokus distribusi zakat untuk orang miskin.

Namun hasil analisis lain menunjukkan bahwa adanya pengaruh ZIS secara tidak langsung terhadap kemiskinan, yaitu dengan nilai original sample/ koefisien (0,336) dan signifikan pada nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5% (0,000). Program-program unggulan dari Baitul Mal Aceh dalam mengurangi kemiskinan yang di Provinsi Aceh dengan dengan perlahan (secara tidak langsung) dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan di Provinsi Aceh. Melalui program pendidikan (bantuan beasiswa), kesehatan (sarana dan prasarana kesehatan), dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (pelatihan

skill, bantuan modal usaha, dan alat-alat kerja) secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh.

ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui Pendidikan dan Kesehatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh distribusi ZIS melalui Pendidikan terhadap Kemiskinan dengan nilai original sample/ koefisien (0,029) dan signifikan pada nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5% (0,220), dan juga tidak terdapatnya pengaruh ZIS melalui Kesehatan terhadap Kemiskinan dengan nilai original sample/ koefisien (-0,066) dan signifikan pada nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5% (0,104). Ini menunjukkan distribusi ZIS melalui program pendidikan maupun kesehatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

ZIS berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui IPM. Hasil analisis pengaruh ZIS melalui IPM terhadap kemiskinan yang menunjukkan terdapat pengaruh yang negative dan signifikan, dengan nilai original sample/ koefisien (-0,344) dan signifikan pada nilai probabilitas kurang dari alfa 5% (0,000), ini menunjukkan bahwa untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh perlu adanya kombinasi dari program-program yang berhubungan dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan skill mustahik, memberikan kesempatan bagi mustahik untuk melakukan kegiatan usaha dengan memberikan modal usaha, dan memberikan kemudahan bagi mustahik yang memiliki sudah usaha dengan adanya bantuan alat-alat kerja. Kemudian di kombinasi dengan program pendidikan yang menjadikan mustahik

yang memiliki potensi dalam bidang pendidikan tertentu dapat mengakses pendidikan sehingga mampu mendukung mustahik agar dapat bersaing di dunia kerja atau dapat memberikan peluang bagi mustahik untuk mendirikan sebuah usaha dan dapat menciptakan lapangan kerja di Provinsi Aceh, dan yang terakhir melalui program kesehatan yang menjadikan mustahik memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga mampu melaksanakan kegiatannya dan akhirnya seluruh mustahik dapat meningkatkan produktivitasnya dalam menciptakan suatu hal yang bernilai.

Tabel 4.12 Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Aceh

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Tengah	16.99	17.51	16.64	16.84	15.58
Banda Aceh	7.78	7.72	7.41	7.44	7.25
Aceh Utara	19.58	19.2	19.46	19.78	18.27
Aceh Besar	16.13	15.93	15.55	15.41	14.47
Aceh Barat	23.7	22.97	21.46	20.38	19.31
Bener Meriah	22.45	21.55	21.43	21.14	20.13
Bireuen	16.94	16.94	15.95	15.87	14.31
Aceh Singkil	17.77	21.72	21.6	22.11	21.25
Nagan Raya	20.85	20.13	19.25	19.34	18.97
Aceh Selatan	12.79	13.24	13.48	14.07	14.01
Aceh Tamiang	14.58	14.57	14.51	14.69	14.21
Sabang	17.02	17.69	17.33	17.66	16.31
Langsa	12.08	11.62	11.09	11.24	10.79
Aceh Timur	15.88	15.85	15.06	15.25	14.49
Gayo Lues	21.43	21.95	21.86	21.97	20.7
Aceh Jaya	16.52	15.93	15.01	14.8	14.85
Subulussalam	19.72	20.39	19.57	19.71	18.51
Pidie Jaya	21.78	21.4	21.18	21.82	20.17
Pidie	20.29	21.18	21.25	21.43	20.47
Lhokseumawe	11.93	12.16	11.98	12.32	11.81
Simeuleu	19.92	20.43	19.93	20.2	19.78
Aceh Barat Daya	17.99	18.25	18.03	18.31	17.1
Aceh Tenggara	13.75	14.91	14.46	14.86	14.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 5.2 menunjukkan presentase penduduk miskin di kab/kota Provinsi Aceh selama periode 2014-2018. Terlihat bahwa seluruh kab/kota yang ada di provinsi Aceh mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ZIS yang memiliki sasaran pada setiap kab/kota di Provinsi Aceh mampu menurunkan kemiskinan secara tidak langsung dan melalui program-program yang diselenggarakan (Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi) namun pada skala kab/kota Provinsi Aceh. Meskipun angka presentase kemiskinan di kab/kota di Provinsi Aceh pada rata-rata angka berkisar 17,72% atau dapat dikatakan memiliki tingkat presentase penduduk miskin yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Abdelmawla (2014), dalam penelitiannya mengenai dampak zakat dan pengetahuan terhadap pengurangan kemiskinan di Sudan. Temuannya menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Sudan. Di mana semakin meningkatnya presentase pengeluaran untuk orang miskin dari total dana zakat sangat dianjurkan dalam mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nisthar dkk (2018) mengenai analisis komparatif hubungan kemiskinan dengan pengumpulan dana zakat dan PDB riil di Malaysia. Temuannya menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara pengentasan kemiskinan dengan pengumpulan zakat dan PDB riil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendidikan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ZIS dapat menurunkan Pendidikan. Namun hasil ini disebabkan oleh kondisi pendidikan di Provinsi Aceh yang belum baik, karena partisipasi masyarakat pada pendidikan beberapa kabupaten yang terus menurun setiap tahunnya serta mutu guru yang rendah, menjadikan pendidikan di Provinsi Aceh terus mengalami menurun setiap tahunnya.
2. ZIS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa program kesehatan (sarana dan prasarana kesehatan) yang menasar pada seluruh mustahik yang dalam kondisi sakit atau membutuhkan alat kesehatan sehingga dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan adanya program ini. Oleh karena itu, program kesehatan yang diselenggarakan Baitul Mal Aceh memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan di Provinsi Aceh.
3. ZIS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan oleh Baitul Maal Aceh melalui pendidikan, kesehatan, dan khususnya pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kualitas masyarakat memiliki

pengaru langsung yang signifikan terhadap peningkatan IPM di Provinsi Aceh.

4. ZIS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh Baitul Maal Aceh (Pelatihan skill, bantuan modal usaha, dan alat-alat kerja) memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
5. ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung ZIS dapat meningkatkan Kemiskinan. Hal ini terjadi karena peningkatan prasetase penduduk miskin di Provinsi Aceh yang mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, terjadinya flutuasi namun cenderung menurun pada penyaluran ZIS oleh Baitul Mal pada asnaf miskin dan lebih besarnya proporsi penyaluran ZIS bagi asnaf Ibnu Sabil yang cukup mendominasi dibandingkan dengan kebutuhan akan penyaluran ZIS bagi asnaf fakir dan miskin.
6. ZIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa, program Baitul Mal Aceh melalui pendidikan (bantuan beasiswa) tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
7. ZIS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi melalui Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa,

program Baitul Mal Aceh melalui kesehatan (bantuan sarana dan prasarana kesehatan) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

8. ZIS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh melalui IPM. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan Baitul Mal Aceh yang mendukung peningkatan kualitas masyarakat baik itu melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
9. ZIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh melalui Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh melalui pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh
10. ZIS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan melalui Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh melalui kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
11. ZIS terbukti berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui IPM. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan Baitul Mal Aceh yang mendukung peningkatan kualitas masyarakat baik itu melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan

ekonomi berpengaruh secara tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

1. Zakat Infaq shadaqah (ZIS) memiliki potensi yang sangat besar, karena mayoritas Negara Indonesia adalah muslim. Sehingga pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah harapannya dapat memberikan perhatian lebih yaitu dengan melakukan kajian lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana ZIS untuk jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pada fokus dalam mengeluarkan mustahik atau masyarakat miskin dari lingkaran kemiskinan.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik yang ada pada tingkatan pusat provinsi, maupun kabupaten untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam penghimpunan maupun penyaluran ZIS. Agar distribusi ZIS dapat dirasakan oleh mustahik atau masyarakat miskin lebih banyak dan memiliki skala yang luas, harapannya BAZNAS mulai dapat menjangkau tidak hanya pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten saja, tetapi tingkatan keluarahan, kecamatan, bahkan RT. Sehingga penghimpunan dana dapat di maksimalkan dan penyalurannya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin pada berbagai tingkatan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmawla, M. A. (2014). The impacts of zakat and knowledge on poverty alleviation in Sudan: An empirical investigation (1990-2009). *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(4).
- Akram, M. M., & Afzal, M. (2014). Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study in Pakistan. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Ale, A. (1980). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Alfian, Mely G, S. S. (1980). *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu Persada.
- Al-Hadist dan Terjemahannya.
- Al-Qu'ran dan Terjemahannya.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Asian Development Bank. (2006). *Poverty Handbook Analysis and Processes to Support ADB Operations: A Working Document*. Development.
- Athoillah, M. A. (2018). The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in The Island of Java: Panel Data Analysis 2011-2012. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 10(2), 205–230.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2011). *Aceh Dalam Angka 2011*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2012). *Aceh Dalam Angka 2012*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2013). *Aceh Dalam Angka 2013*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2014). *Aceh Dalam Angka 2014*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2015). *Aceh Dalam Angka 2015*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2016). *Aceh Dalam Angka 2016*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2017). *Aceh Dalam Angka 2017*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). *Aceh Dalam Angka 2018*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Badan Zakat Nasional. (2018). *Laporan Outlook Zakat Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: 2018.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Data Pengumpulan Zakat Baitul mal Aceh dan Kab/Kota 2008-2018*. Provinsi Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Data Penyaluran Zakat Baitul mal Aceh dan Kab/Kota 2008-2018*. Provinsi Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2015). *Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2015*. Provinsi Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Black, J., Hashimzade, N., & Myles, G. (2009). *A Dictionary of Economics. A Dictionary of Economics*. <https://doi.org/10.1093/acref/9780199237043.001.0001>
- Choudury, M. (1992). *The Principle of Islamic Political Economy: a Methodological enquiry*. United States of America: ST Martin's Press.INC.
- Depkes RI. (1991). *Pedoman Kerja Puskesmas*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Din, T. El. (1986). Allocative and Stability Function of Zakat in an Islamic Economy. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3.
- Falk R & Miller. 1992. *A Primer For Soft Modeling*. Akron: University of Akron
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. <https://doi.org/10.9744/jmk.10.2.pp.124-135>

- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) (4th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali & Latan. (2015). *Partial Least Square SEM (PLS - SEM). Partial Least Square*. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
- Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks. Sage.
- Hartono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahf, Monzer. (2002). *Economics of Zakah Book of Readig No.2*. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic Research And Training Institute.
- Kahf, Monzer. (2002). *Introduction to Study of The Economics of Zakah*. Jeddah: IRTI.
- Kareem & Bankole, A. (2016). Zakah, Poverty Alleviation, and Inclusive Growth in Nigeria. *Journal of Islamic Finance*, 5(2), 53–65.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Aceh Tahun 2011-2018*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, 65–79. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89>
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pemabangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mannan, M A. (1986). *The Economics of poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*, dalam munawar Iqbal (ed). *Distributive Justive and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Margaret Hardiman, J., & Midgley, S. (1982). *The Social Dimensions of Develeopment: Social Policy and planning in the Third World*. United States of America: John Wiley & Sons Ltd.
- Metwally M.M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.

- Muhammad, M. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan Majelis Pendidikan Daerah Aceh*, 8(1).
- Mohamed, A., Ibrahim, A. A. Bin, Zaidi, N. S. B., & Kamaruzaman, M. N. Bin. (2019). Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(6), 786–807. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i6/6033>
- Muhammad, R. (2004). Sejarah Islam di Aceh. *Konferensi Tahunan PPs UIN/IAIN/STAIN Se-Indonesia*. Banda Aceh.
- Mulajawan, Priyonggo, & Jardine. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi- Universitas Islam Indonesia.
- Nisthar, S., & Nufile, A. A. M. (2017). A Comparative Analysis of The Relationship of Nature of Poverty with Zakat Collection and Real Gross Domestic Product : An Empirical Study in The Context of Indonesia. *Advance Research Journal of Multi-Disciplinary Discoveries*, 8(1), 21–36.
- Nurjanah, F., . K., & . J. (2019). The Impact of Economic Growth and Distribution of Zakat Funds on Poverty (Survey in the Third District of West Java Province Period 2011-2016). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4195>
- Nurul Huda, Yosi Mardoni, Novarini, C. P. S. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Pujiyono, A. (2008). *Studi Efektivitas dan Efisiensi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Sebagai Dana Sosial Mandiri Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Semarang: Hibah Penelitian PHK A3 FE-UNDIP.
- Pratama, S. D., & Rahadiana, R. (2020). Muzakki Potentials' Role in Alleviating Poverty (Study Case in Aceh). *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*. <https://doi.org/10.18196/ijief.2123>
- Qanun Aceh No.10. 2018. *Baitul Mal Aceh Provinsi Aceh*: 2018.
- Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh al-zakah*. Beirut: Muassasat Al-Risalah.
- Rédha, B. M., Larbi, G., & Karima, R. M. (2016). The Impact of Zakat Fund in Reducing Poverty Case of Algeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(3), 1–9. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3p256>
- Sadeq, A. (2006). *Development Issues in Islam*. Malaysia: International Islamic University

Malaysia.

- Sarjono dan Julianita. (2015). *Structural Equation Modeling (SEM): Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba 4.
- Senandji, Abdhik, Tameurm, N. (2015). The Impact of Zakat on Income Inequality and poverty in Malaysia: A Panel Data Analysis. *Market Forces Journal of Management, Business & Economics*, 10(1).
- Soedomo, Hadi. (2008). *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suprayitno, E., Aslam, M., & Harun, A. (2017). Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.15>
- Susmodiningrat, G. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Graha Pustaka Utama
- Syauqi, B. (2013). *A Case Study in The Province of DKI Jakarta, Indonesia*. German: Lambert Academic Publishing.
- Todaro, M. P. (2002). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Tujuh)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah Aceh No.11. 2006. *Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah*. Provinsi Aceh: 2006.
- United Nations Development Program. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: United Nations Development Program.
- United Nations Development Program. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: United Nations Development Program.
- Wibisiono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 Tahun 2011*. Jakarta: Kharisma Utama.
- Wijayanto, Setyo Hari. (2008). *Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN 1

Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, ZIS, dan Pendidikan

KAB/KOTA	Y1	Y2.1	Y2.2	Y2.3	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2
Aceh Tengah	4166898	19.58	2.95	0.67	7683447241	6852350650	77.55	68.78
Aceh Tengah	4347738	18.77	2.60	0.56	7800222452	5440426257	66.45	69.61
Aceh Tengah	4584208	17.76	2.21	0.76	8145599344	7288145594	72.81	61.12
Aceh Tengah	4770082	16.99	2.18	0.43	13912300069	7561535503	71.47	54.40
Aceh Tengah	4972052	17.51	2.58	0.60	18106428087	17177453662	66.35	53.82
Aceh Tengah	5199833	16.64	2.51	0.67	17408027424	17443722120	67.16	47.51
Aceh Tengah	5412026	16.84	3.54	1.02	16726917955	17479003198	68.03	47.13
Aceh Tengah	5634000	15.58	1.75	0.39	18321298190	7304549619	64.55	45.21
Banda Aceh	10518849	9.08	1.43	0.31	998612123	9150108180	120.15	72.71
Banda Aceh	11079680	8.65	1.73	0.44	16962640342	8439565000	103.84	73.49
Banda Aceh	11597228	8.03	1.41	0.35	14500384971	17083250000	90.32	67.66
Banda Aceh	12118527	7.78	1.03	0.23	14735699593	15751157721	83.04	69.10
Banda Aceh	12724949	7.72	1.64	0.50	17633827136	17846614000	81.96	64.45
Banda Aceh	13529409	7.41	1.69	0.56	19481191339	15985025000	80.33	53.92
Banda Aceh	13940316	7.44	1.54	0.48	14639943517	17346132341	84.78	55.70
Banda Aceh	14562000	7.25	1.22	0.31	18149646282	16796498920	83.61	57.72
Aceh Utara	17200433	22.89	3.79	0.96	7606835924	4323362710	61.46	48.62
Aceh Utara	17867553	21.89	3.40	0.82	984918944	13730588384	53.04	48.70
Aceh Utara	18151766	20.34	2.65	0.54	11720081211	5677094000	60.95	44.00
Aceh Utara	17836613	19.58	3.08	0.74	15090567510	10741629531	57.99	40.02

Aceh Utara	17195546	19.20	3.14	0.82	21413184932	11764895917	55.79	42.46
Aceh Utara	15184776	19.46	3.14	0.66	17375466644	15351815605	57.75	40.90
Aceh Utara	15193713	19.78	3.22	0.83	17490563191	20636104993	61.32	43.25
Aceh Utara	16356000	18.27	3.20	0.87	17431781521	12686757273	62.66	44.33
Aceh Besar	7256105	18.36	3.66	1.13	7214199536	5847213677	58.92	46.25
Aceh Besar	7549095	17.50	2.63	0.62	11659039071	12264664060	69.85	46.33
Aceh Besar	7863467	16.88	2.89	0.76	11883420606	5785466444	67.07	51.52
Aceh Besar	8184457	16.13	2.76	0.69	23145026733	8604335073	65.45	48.66
Aceh Besar	8513244	15.93	2.54	0.55	15837885118	12295466845	61.66	48.95
Aceh Besar	8854439	15.55	2.73	0.72	17629265409	13272169101	60.90	41.43
Aceh Besar	9208377	15.41	3.41	1.04	15822152871	14092246093	67.21	45.71
Aceh Besar	9588000	14.47	3.40	1.10	18209491756	16051469299	68.64	48.74
Aceh Barat	4569067	22.81	4.06	1.07	5427329938	4986728466	91.46	73.16
Aceh Barat	4594543	22.76	3.32	0.75	6885650779	4784237248	95.16	73.16
Aceh Barat	4773668	23.70	3.68	0.85	7817805996	6679563756	89.67	73.60
Aceh Barat	4933842	22.97	4.30	1.18	10140062700	6994971949	80.18	60.72
Aceh Barat	5160040	21.46	4.28	1.38	11121688627	10357258552	74.39	59.01
Aceh Barat	5130703	20.38	4.72	1.61	12643380826	11876619100	75.74	53.61
Aceh Barat	6008220	20.28	4.74	1.52	12885122146	11585770192	77.96	53.38
Aceh Barat	6586000	19.31	3.91	1.13	14479604572	14282741081	76.25	53.86
Bener Meriah	2528784	22.50	3.94	0.99	6949490465	3080369824	104.83	83.46
Bener Meriah	2661123	24.50	3.78	0.94	8037854683	6178931276	90.71	84.26
Bener Meriah	2804613	23.47	3.34	0.73	7988152289	6154620668	79.38	61.27
Bener Meriah	2929388	22.45	3.47	0.79	6932944653	5590182369	68.98	36.67
Bener Meriah	3070581	21.55	3.29	0.83	9379815710	7680471829	70.20	52.77

Bener Meriah	3207521	21.43	3.30	0.85	8397296838	8871072208	71.81	50.93
Bener Meriah	3337614	21.14	3.68	0.83	8587416870	8005080736	72.51	53.26
Bener Meriah	3477000	20.13	0.88	0.75	8635682849	9141657344	71.27	49.52
Bireuen	7397629	19.06	3.46	1.00	2958491000	1044280000	66.90	54.10
Bireuen	7689706	18.21	2.87	0.69	3193849000	1100656000	62.94	54.46
Bireuen	7999503	17.65	2.80	0.67	4712255857	1501617000	61.48	43.32
Bireuen	8171310	16.94	2.21	0.53	5891973000	5170892120	63.35	45.42
Bireuen	8481897	16.94	2.11	0.47	7244097000	7035247800	61.30	48.79
Bireuen	8827935	15.95	3.07	0.84	10082635000	8737931500	61.99	43.87
Bireuen	9189319	15.87	2.99	0.81	9870534811	8409655900	62.73	44.39
Bireuen	9582000	14.31	2.31	0.53	11518823859	9554731000	61.82	42.79
Aceh Singkil	1263085	18.93	3.14	0.75	1366228540	800000000	90.76	64.13
Aceh Singkil	1315931	17.92	1.90	0.37	1312927436	1000000000	93.25	63.89
Aceh Singkil	1374981	18.73	2.77	0.66	1563121246	1000000000	93.20	70.63
Aceh Singkil	1426081	17.77	2.65	0.68	1846143719	1826333280	82.85	58.87
Aceh Singkil	1479141	21.72	5.29	1.84	2200000000	3147300000	77.03	59.99
Aceh Singkil	1540654	21.60	4.47	1.33	7003301601	7003301601	75.00	55.56
Aceh Singkil	1467178	22.11	5.94	2.15	7056900000	7056900000	82.29	57.67
Aceh Singkil	1665000	21.25	4.85	1.52	5741738259	4973000000	86.37	61.29
Nagan Raya	4693587	23.38	3.54	0.95	3152812509	4100000000	100.20	67.65
Nagan Raya	4867307	22.27	3.78	1.07	4100000000	1475855015	101.27	68.12
Nagan Raya	5032698	21.75	3.34	0.87	3516000000	3516000000	89.52	67.47
Nagan Raya	5204811	20.85	3.87	1.17	4017850000	4021850000	87.80	59.89
Nagan Raya	5422070	20.13	3.84	1.06	4022850000	3795115000	84.06	64.55
Nagan Raya	5641779	19.25	3.14	0.86	6946244258	6011873638	83.32	60.26

Nagan Raya	5867771	19.34	2.53	0.58	7809500000	7809500000	84.27	60.07
Nagan Raya	6120000	18.97	3.70	1.01	5922847908	8885000000	85.23	60.41
Aceh Selatan	2953612	15.52	2.45	0.57	1606013555	1412896333	90.64	62.08
Aceh Selatan	3115597	14.80	2.17	0.59	1764088127	1288563475	87.59	62.87
Aceh Selatan	3281364	13.44	2.09	0.44	1967689221	2264000000	86.29	64.95
Aceh Selatan	3429428	12.79	1.85	0.42	4208748700	2812000000	82.68	57.89
Aceh Selatan	3574591	13.24	1.94	0.42	6035311107	5020198129	79.63	62.01
Aceh Selatan	3740292	13.48	1.83	0.35	7006717185	5641918896	75.06	53.52
Aceh Selatan	3887220	14.07	2.44	0.64	6354787347	5054978983	76.53	54.78
Aceh Selatan	4069000	14.01	1.78	0.37	5954486985	6598000000	77.68	55.18
Aceh Tamiang	4474076	17.49	2.27	0.49	1657019624	1296524060	76.56	62.84
Aceh Tamiang	4651203	16.70	2.35	0.62	1288563475	4270384000	80.09	63.59
Aceh Tamiang	4885618	15.13	2.09	0.56	2163244372	701500037	75.79	62.94
Aceh Tamiang	5002816	14.58	1.76	0.37	3670024081	2063484371	77.84	64.21
Aceh Tamiang	5134529	14.57	1.88	0.44	8965572726	4599179081	75.14	61.24
Aceh Tamiang	5275640	14.51	2.25	0.45	11377694986	5490380766	73.05	51.51
Aceh Tamiang	5487009	14.69	2.26	0.57	12142169185	1288563475	75.97	52.62
Aceh Tamiang	5728000	14.21	1.54	0.31	10171669266	1288563475	78.59	55.76
Sabang	774469	21.31	3.91	1.03	3253048041	2040303125	104.55	64.61
Sabang	806875	20.51	3.91	1.17	3214914176	2117833113	110.93	59.59
Sabang	841005	18.31	4.06	1.20	3491934976	2470382541	86.86	61.72
Sabang	875118	17.02	3.40	0.89	4218658632	2340595000	72.18	60.28
Sabang	912987	17.69	0.97	0.85	4543625912	4182335200	71.10	51.74
Sabang	957293	17.33	3.17	0.88	5243003662	4969787350	69.97	45.53
Sabang	1015425	17.66	2.99	0.76	5245403933	5327976700	76.23	48.33

Sabang	1075000	16.31	2.64	0.64	5496483258	4909156157	82.22	53.38
Langsa	2722522	14.66	2.36	0.64	1818100317	809713000	92.38	68.39
Langsa	2851123	13.93	1.84	0.36	2212386666	2117833113	98.72	64.02
Langsa	2981532	12.62	1.89	0.39	2493527507	1996651072	88.18	65.06
Langsa	3107821	12.08	1.85	0.39	3518597075	2464826035	75.94	59.82
Langsa	3244671	11.62	2.06	0.57	3680140157	3668480034	71.90	51.62
Langsa	3391389	11.09	2.25	0.55	4943104639	4943104639	71.04	48.42
Langsa	3542885	11.24	1.67	0.41	5219879390	4992215270	73.74	49.81
Langsa	3702000	10.79	1.34	0.28	3600000000	3600000000	72.51	49.97
Aceh Timur	7479287	16.39	2.33	0.52	2927029341	2000000000	59.61	47.06
Aceh Timur	7677933	17.19	2.70	0.67	3857066151	2998900000	54.50	47.34
Aceh Timur	7761221	16.59	2.92	0.80	4561464273	2740991742	54.10	44.14
Aceh Timur	7721422	15.88	0.89	0.82	7825972887	3499400000	54.17	43.40
Aceh Timur	7259933	15.85	2.33	0.59	3549183284	4420351794	56.94	45.59
Aceh Timur	7185794	15.06	2.25	0.53	3694780435	4855000000	56.74	39.39
Aceh Timur	7481990	15.25	2.85	0.79	3871963680	5102275000	60.02	40.34
Aceh Timur	7816000	14.49	2.03	0.41	4939637436	4939637436	62.76	43.75
Gayo Lues	1452757	23.38	3.35	0.73	1286054500	1514146000	94.00	74.63
Gayo Lues	1531658	22.30	2.84	0.63	1434908197	480046000	85.49	75.29
Gayo Lues	1590759	22.33	4.10	1.06	1640981652	1057692000	89.16	67.06
Gayo Lues	1652368	21.43	4.11	1.20	2074840617	1093300000	90.36	70.69
Gayo Lues	1717272	21.95	4.10	1.07	4114344524	1093300000	84.92	66.82
Gayo Lues	1786368	21.86	4.83	1.45	5219347658	4656750000	87.81	66.30
Gayo Lues	1876130	21.97	4.66	1.37	4222250614	5222036165	93.96	66.72
Gayo Lues	1931000	20.70	3.61	0.95	4302068965	3294080000	89.81	67.31

Aceh Jaya	1482238	19.80	3.69	1.06	1200000000	945000000	79.98	59.58
Aceh Jaya	1541268	18.30	3.47	1.11	2190000000	1200000000	73.79	60.40
Aceh Jaya	1590573	17.53	3.04	0.83	2323700000	836600000	81.38	65.42
Aceh Jaya	1649326	16.52	2.47	0.71	3319155230	2236803230	81.76	59.39
Aceh Jaya	1719445	15.93	2.30	0.55	4623695647	3319155230	78.01	61.81
Aceh Jaya	1778301	15.01	3.04	0.87	5805453964	4579615092	78.17	53.93
Aceh Jaya	1854246	14.85	2.29	0.50	7861018151	5138453964	84.42	57.60
Aceh Jaya	1923000	14.16	2.40	0.73	6800921537	8241715883	87.36	61.40
Subulussalam	940710	23.85	4.28	1.15	1043397589	639950000	118.62	49.42
Subulussalam	984713	22.63	4.12	1.11	1394487539	635293583	112.38	49.98
Subulussalam	1033527	20.69	2.39	0.42	1445636490	984500000	91.08	64.59
Subulussalam	1086364	19.72	2.99	0.67	1656245018	136735000	78.01	38.64
Subulussalam	1134378	20.39	3.43	0.91	3554856443	2843833300	79.33	52.52
Subulussalam	1191823	19.57	3.61	0.98	5021164459	4362337271	75.56	56.17
Subulussalam	1253318	19.71	3.20	0.94	4135799167	3220559600	80.07	57.05
Subulussalam	1308000	18.51	2.67	0.56	3463036298	3325118650	83.08	60.94
Pidie Jaya	1838921	25.43	5.28	1.73	3639386978	1519000000	58.67	47.16
Pidie Jaya	1918490	24.35	3.79	0.94	2380464723	2404404114	63.87	45.67
Pidie Jaya	2005778	22.70	3.34	0.83	2518490599	1699500000	58.09	43.46
Pidie Jaya	2078513	21.78	2.92	0.57	2504391382	2137333733	59.15	45.31
Pidie Jaya	2179210	21.40	3.92	1.06	3181633352	2491247321	58.79	43.59
Pidie Jaya	2259852	21.18	3.25	0.78	3605990225	3447769500	65.24	44.44
Pidie Jaya	2390844	21.82	3.26	0.81	3193491568	3189478405	65.74	46.92
Pidie Jaya	2503000	20.17	2.60	0.60	3067758862	2810650500	63.44	44.96
Pidie	5550233	23.19	3.66	1.13	1713963488	1341807908	73.57	59.63

Pidie	5801221	22.12	3.01	0.58	2748006813	2120753691	74.54	58.91
Pidie	6046953	21.12	2.99	0.67	3189603707	710611828	76.44	56.36
Pidie	6290576	20.29	3.40	0.75	2740448179	2222734800	73.90	52.67
Pidie	6594085	21.18	4.28	1.41	3428689015	3747600404	70.77	52.68
Pidie	6851960	21.25	4.55	1.54	8653229377	3292339499	70.61	48.78
Pidie	7152947	21.43	4.18	1.21	7915617776	6449804575	70.53	48.92
Pidie	7459000	20.47	4.02	1.20	5773696906	5727209964	67.30	48.24
Lhokseumawe	8873694	13.73	2.11	0.52	3794267588	3272862150	96.57	74.65
Lhokseumawe	8980337	13.06	1.36	0.24	4444775492	3527175850	86.97	75.07
Lhokseumawe	8878224	12.47	2.05	0.49	7547270363	2971002588	91.96	62.47
Lhokseumawe	8222328	11.93	1.86	0.46	4700000000	3484200000	80.43	62.92
Lhokseumawe	6550149	12.16	2.30	0.62	7621400919	6236422207	74.80	59.33
Lhokseumawe	6460408	11.98	2.00	0.59	8790038934	3056714000	74.24	54.17
Lhokseumawe	6593492	12.32	1.68	0.40	7160743175	4008371950	76.74	56.40
Lhokseumawe	6837000	11.81	1.72	0.39	7423067372	5152062789	75.88	57.85
Simeuleu	1122209	22.96	4.61	1.37	1535495114	1196000001	135.09	72.86
Simeuleu	1180151	18.58	3.07	0.83	1042820670	315951000	125.44	73.08
Simeuleu	1235543	20.57	3.46	0.91	3500000000	3500000000	92.47	64.09
Simeuleu	1289096	19.92	2.68	0.56	3006561351	3599818663	85.74	62.60
Simeuleu	1344658	20.43	2.97	0.64	3452050000	1922066000	82.71	64.30
Simeuleu	1405844	19.93	3.48	0.97	2320000000	2320000000	84.59	57.86
Simeuleu	1467178	20.20	2.78	0.63	2702800000	2702800000	84.12	56.18
Simeuleu	1534000	19.78	3.11	0.68	3363604666	3363604666	83.82	55.27
Aceh Barat Daya	2303125	19.49	2.63	0.58	1947023656	1539740634	94.98	70.24
Aceh Barat Daya	2347145	18.51	2.34	0.46	1792335965	97781500	99.21	70.38

Aceh Barat Daya	2401899	18.92	2.64	0.63	1899322845	1709075000	86.69	61.40
Aceh Barat Daya	2428320	17.99	2.58	0.57	1825298165	1709075000	88.50	67.40
Aceh Barat Daya	2509313	18.25	2.66	0.61	2920979133	2831710860	83.21	66.46
Aceh Barat Daya	2623750	18.03	3.61	1.05	3000000000	1855462250	83.64	59.69
Aceh Barat Daya	2740778	18.31	2.88	0.66	2672132531	3000000000	83.31	59.77
Aceh Barat Daya	2869000	17.10	2.15	0.46	3360881377	7213869851	79.98	56.11
Aceh Tenggara	2464463	16.39	2.33	0.52	3000000000	3000000000	88.52	67.44
Aceh Tenggara	2578093	15.63	2.63	0.75	1896956787	3000000000	86.30	67.50
Aceh Tenggara	2704181	14.39	1.78	0.37	3733638000	1027458000	83.07	66.86
Aceh Tenggara	2807992	13.75	2.32	0.58	4347873000	4255561000	81.04	61.07
Aceh Tenggara	2921131	14.91	2.71	0.83	4959587000	4959587000	76.93	62.19
Aceh Tenggara	3051879	14.46	2.54	0.62	5709370000	5709370000	76.65	55.89
Aceh Tenggara	3199062	14.86	1.00	0.37	4287040000	4870000000	80.12	56.80
Aceh Tenggara	3296000	14.29	2.23	0.51	7797000000	4870000000	79.35	57.10

Lampiran 2
Data Kesehatan dan IPM

KAB/KOTA	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4
Aceh Tengah	14.00	37.00	68.27	98.41	13.49	9295
Aceh Tengah	14.00	26.00	68.30	98.33	13.55	9330
Aceh Tengah	14.00	16.00	68.35	98.98	13.76	9365
Aceh Tengah	14.00	57.00	68.38	99.37	14.11	9400
Aceh Tengah	14.00	49.00	68.44	99.19	14.21	9435
Aceh Tengah	14.00	25.00	68.48	99.03	14.23	9473
Aceh Tengah	14.00	54.00	68.53	99.31	14.24	9920
Aceh Tengah	22.00	110.00	68.62	100.00	14.25	10021
Banda Aceh	11.00	121.00	70.74	98.57	16.06	13488
Banda Aceh	11.00	29.00	70.76	99.25	16.16	13846
Banda Aceh	11.00	18.00	70.79	99.39	16.26	14205
Banda Aceh	11.00	50.00	70.80	99.99	16.36	14629
Banda Aceh	11.00	45.00	70.89	99.62	17.01	14766
Banda Aceh	11.00	24.00	70.92	99.10	17.03	15362
Banda Aceh	11.00	377.00	70.96	99.42	17.10	15737
Banda Aceh	12.00	475.00	70.10	100.00	17.26	25917
Aceh Utara	28.00	100.00	68.36	95.27	13.69	6361
Aceh Utara	31.00	90.00	68.40	96.43	13.77	6465
Aceh Utara	31.00	80.00	68.41	97.09	13.89	6562
Aceh Utara	31.00	119.00	68.42	98.70	13.99	9714

Aceh Utara	31.00	89.00	68.48	97.18	14.10	6838
Aceh Utara	31.00	51.00	68.51	98.05	14.11	7327
Aceh Utara	32.00	82.00	68.54	97.63	14.42	7520
Aceh Utara	30.00	114.00	68.61	100.00	14.68	7632
Aceh Besar	28.00	81.00	69.38	96.06	13.91	8138
Aceh Besar	28.00	78.00	69.41	95.59	13.91	8246
Aceh Besar	28.00	73.00	69.44	96.68	14.21	8344
Aceh Besar	28.00	79.00	69.46	98.76	14.35	8497
Aceh Besar	28.00	95.00	69.47	98.15	14.47	8622
Aceh Besar	28.00	73.00	69.49	98.05	14.48	8775
Aceh Besar	28.00	85.00	69.52	97.21	14.49	6788
Aceh Besar	44.00	116.00	69.59	100.00	14.70	8965
Aceh Barat	13.00	46.00	67.21	93.76	14.27	7576
Aceh Barat	13.00	11.00	67.25	94.96	14.29	7632
Aceh Barat	13.00	25.00	67.30	96.63	14.32	7688
Aceh Barat	13.00	51.00	67.33	98.41	14.35	7744
Aceh Barat	13.00	51.00	67.49	96.32	14.55	7771
Aceh Barat	13.00	23.00	67.56	96.94	14.56	8135
Aceh Barat	13.00	48.00	67.62	98.37	14.57	8559
Aceh Barat	13.00	64.00	67.72	99.67	14.58	8989
Bener Meriah	10.00	25.00	69.56	96.87	12.69	9000
Bener Meriah	10.00	34.00	68.58	97.78	12.78	9289
Bener Meriah	10.00	19.00	68.62	98.73	12.93	9580
Bener Meriah	11.00	27.00	68.64	98.81	13.02	9645
Bener Meriah	13.00	54.00	68.79	99.46	13.04	9721

Bener Meriah	13.00	39.00	68.85	98.96	13.42	9760
Bener Meriah	13.00	53.00	68.90	99.25	13.43	10140
Bener Meriah	13.00	81.00	68.99	100.00	13.44	10043
Bireuen	18.00	91.00	70.30	97.24	13.83	6644
Bireuen	18.00	40.00	70.32	97.65	14.03	6822
Bireuen	18.00	41.00	70.34	98.25	14.22	6996
Bireuen	18.00	104.00	70.35	99.09	14.25	7232
Bireuen	18.00	98.00	70.64	98.69	14.41	7319
Bireuen	18.00	58.00	70.72	98.98	14.42	7622
Bireuen	18.00	104.00	70.80	98.98	14.80	7885
Bireuen	21.00	149.00	70.92	100.00	14.81	8237
Aceh Singkil	11.00	39.00	66.76	93.23	12.84	7081
Aceh Singkil	11.00	28.00	66.85	92.64	13.49	7123
Aceh Singkil	11.00	17.00	66.91	94.74	13.85	7165
Aceh Singkil	11.00	40.00	66.94	96.51	14.05	7208
Aceh Singkil	11.00	44.00	66.97	97.26	14.26	7221
Aceh Singkil	11.00	33.00	67.02	96.83	14.27	7602
Aceh Singkil	11.00	42.00	67.07	96.14	14.28	8068
Aceh Singkil	12.00	54.00	67.16	98.45	14.29	8230
Nagan Raya	13.00	30.00	66.35	93.77	13.20	6629
Nagan Raya	13.00	27.00	66.39	93.57	13.27	6834
Nagan Raya	13.00	31.00	66.45	93.93	13.34	6902
Nagan Raya	14.00	30.00	66.48	97.20	13.42	7019
Nagan Raya	14.00	29.00	66.63	96.01	14.04	7084
Nagan Raya	14.00	14.00	66.70	96.22	14.09	7141

Nagan Raya	14.00	53.00	66.77	95.58	14.10	7460
Nagan Raya	15.00	64.00	66.89	99.92	14.11	7732
Aceh Selatan	22.00	45.00	63.03	94.42	12.51	6855
Aceh Selatan	22.00	32.00	63.12	93.27	12.57	6890
Aceh Selatan	23.00	31.00	63.16	94.90	13.01	6913
Aceh Selatan	23.00	42.00	63.18	96.91	13.05	6989
Aceh Selatan	23.00	64.00	63.64	96.54	13.24	7003
Aceh Selatan	23.00	48.00	63.75	96.89	13.53	7224
Aceh Selatan	23.00	53.00	63.89	96.15	13.80	7397
Aceh Selatan	27.00	85.00	64.02	99.40	14.15	7567
Aceh Tamiang	14.00	43.00	68.61	96.33	12.34	7420
Aceh Tamiang	14.00	42.00	68.65	95.97	12.57	7455
Aceh Tamiang	14.00	39.00	68.66	96.75	12.79	7478
Aceh Tamiang	14.00	36.00	68.67	97.83	13.27	7554
Aceh Tamiang	14.00	49.00	68.99	98.09	13.54	7569
Aceh Tamiang	14.00	38.00	69.08	97.65	13.55	7750
Aceh Tamiang	14.00	50.00	69.16	98.45	13.56	7766
Aceh Tamiang	16.00	74.00	69.28	99.73	13.57	7931
Sabang	6.00	20.00	69.54	96.72	11.91	9047
Sabang	6.00	7.00	69.54	98.25	12.07	9254
Sabang	5.00	20.00	69.54	98.71	12.23	9692
Sabang	6.00	28.00	69.54	98.75	12.39	9718
Sabang	6.00	25.00	69.93	98.03	12.98	9823
Sabang	6.00	9.00	70.01	98.94	13.17	10041
Sabang	6.00	22.00	70.09	98.71	13.58	10507

Sabang	5.00	37.00	70.21	98.67	13.66	10610
Langsa	5.00	30.00	68.70	97.86	13.61	9496
Langsa	5.00	24.00	68.75	98.25	13.93	9713
Langsa	5.00	24.00	68.78	99.01	14.25	9925
Langsa	5.00	33.00	68.79	99.91	14.58	10198
Langsa	5.00	34.00	68.94	99.08	15.16	10284
Langsa	5.00	19.00	69.00	99.29	15.17	10605
Langsa	5.00	43.00	69.06	98.50	15.18	11015
Langsa	5.00	78.00	69.16	99.43	15.19	11261
Aceh Timur	26.00	83.00	67.97	95.30	11.61	6897
Aceh Timur	26.00	64.00	68.02	97.54	11.69	7178
Aceh Timur	26.00	50.00	68.05	97.85	1.76	7219
Aceh Timur	26.00	65.00	68.06	98.68	11.83	7288
Aceh Timur	26.00	68.00	68.20	97.85	12.23	7623
Aceh Timur	26.00	55.00	68.26	98.16	12.55	7825
Aceh Timur	26.00	82.00	68.33	98.35	13.00	7961
Aceh Timur	28.00	110.00	68.44	99.60	13.01	8252
Gayo Lues	12.00	28.00	64.31	90.16	12.77	7635
Gayo Lues	12.00	16.00	64.38	87.89	12.89	7646
Gayo Lues	12.00	23.00	64.42	90.37	13.01	7709
Gayo Lues	12.00	36.00	64.44	91.42	13.03	7742
Gayo Lues	12.00	35.00	64.77	93.13	13.13	7780
Gayo Lues	12.00	37.00	64.88	94.20	13.27	8084
Gayo Lues	12.00	30.00	64.98	96.72	13.28	8322
Gayo Lues	11.00	60.00	65.12	99.19	13.49	8529

Aceh Jaya	8.00	21.00	66.35	93.31	12.51	8596
Aceh Jaya	10.00	25.00	66.39	95.30	13.30	8679
Aceh Jaya	10.00	28.00	66.45	95.67	13.69	8691
Aceh Jaya	10.00	23.00	66.48	97.40	13.81	8721
Aceh Jaya	10.00	36.00	66.63	95.96	13.93	8749
Aceh Jaya	10.00	35.00	66.70	96.90	13.94	8796
Aceh Jaya	10.00	35.00	66.77	96.46	13.95	8322
Aceh Jaya	12.00	69.00	66.88	99.20	13.96	9262
Subulussalam	5.00	10.00	62.83	91.76	12.89	6230
Subulussalam	5.00	19.00	62.83	90.32	13.03	6275
Subulussalam	5.00	13.00	62.86	91.12	13.16	6320
Subulussalam	5.00	16.00	62.87	94.42	13.30	6326
Subulussalam	5.00	15.00	63.27	96.30	13.73	6504
Subulussalam	5.00	7.00	63.42	95.94	14.18	6669
Subulussalam	5.00	26.00	63.56	98.08	14.19	6887
Subulussalam	7.00	36.00	63.69	99.05	14.20	7039
Pidie Jaya	10.00	34.00	69.05	93.22	13.70	8935
Pidie Jaya	10.00	30.00	69.07	92.75	3.76	9027
Pidie Jaya	11.00	31.00	69.11	92.81	13.92	9173
Pidie Jaya	11.00	31.00	69.13	96.49	14.03	9260
Pidie Jaya	11.00	35.00	69.49	96.96	14.14	9399
Pidie Jaya	11.00	18.00	69.59	95.64	14.51	9590
Pidie Jaya	11.00	41.00	69.68	97.51	14.52	9691
Pidie Jaya	12.00	72.00	69.81	98.98	14.53	9967
Pidie	26.00	73.00	66.20	96.30	13.07	9076

Pidie	26.00	34.00	66.25	95.24	13.21	9121
Pidie	26.00	50.00	66.27	94.16	13.36	9167
Pidie	26.00	91.00	66.28	96.93	13.50	9182
Pidie	26.00	52.00	66.46	95.40	13.61	9233
Pidie	26.00	65.00	66.52	95.87	13.93	9237
Pidie	26.00	90.00	66.58	96.57	14.25	9377
Pidie	28.00	188.00	66.68	99.87	14.44	9492
Lhokseumawe	6.00	45.00	70.57	98.29	14.23	8900
Lhokseumawe	6.00	24.00	70.56	98.17	14.91	9303
Lhokseumawe	6.00	27.00	70.61	99.41	14.92	9580
Lhokseumawe	6.00	17.00	70.62	99.84	15.11	9678
Lhokseumawe	6.00	17.00	70.96	99.37	15.14	10093
Lhokseumawe	6.00	45.00	71.05	98.99	15.16	10549
Lhokseumawe	6.00	56.00	71.14	99.43	15.17	10673
Lhokseumawe	7.00	54.00	71.27	100.00	15.18	10836
Simeuleu	8.00	3.00	64.15	98.85	12.66	5781
Simeuleu	8.00	11.00	64.22	99.29	12.67	5854
Simeuleu	10.00	11.00	64.23	99.79	12.67	5950
Simeuleu	11.00	19.00	64.24	99.96	12.75	5956
Simeuleu	11.00	18.00	64.66	99.00	12.83	6328
Simeuleu	12.00	6.00	64.78	98.71	13.07	6542
Simeuleu	12.00	20.00	64.90	98.84	13.23	6677
Simeuleu	15.00	39.00	65.00	99.71	13.25	6824
Aceh Barat Daya	13.00	26.00	63.55	93.23	12.94	6655
Aceh Barat Daya	13.00	26.00	63.63	93.83	12.98	6822

Aceh Barat Daya	13.00	17.00	63.69	94.65	13.02	6966
Aceh Barat Daya	13.00	16.00	63.72	96.39	13.11	7059
Aceh Barat Daya	13.00	41.00	64.20	96.64	13.20	7303
Aceh Barat Daya	13.00	24.00	64.35	96.12	13.54	7567
Aceh Barat Daya	13.00	44.00	64.51	97.12	13.55	7723
Aceh Barat Daya	13.00	57.00	64.65	99.50	13.56	8093
Aceh Tenggara	18.00	40.00	66.93	96.76	12.66	6731
Aceh Tenggara	18.00	29.00	66.96	96.77	13.18	6788
Aceh Tenggara	18.00	25.00	67.03	98.08	13.54	6899
Aceh Tenggara	18.00	39.00	67.07	99.26	13.59	6949
Aceh Tenggara	18.00	46.00	67.40	98.65	13.62	7001
Aceh Tenggara	18.00	20.00	67.51	98.59	13.96	7212
Aceh Tenggara	18.00	43.00	67.62	99.24	13.97	7359
Aceh Tenggara	27.00	49.00	67.77	99.81	13.98	7685